

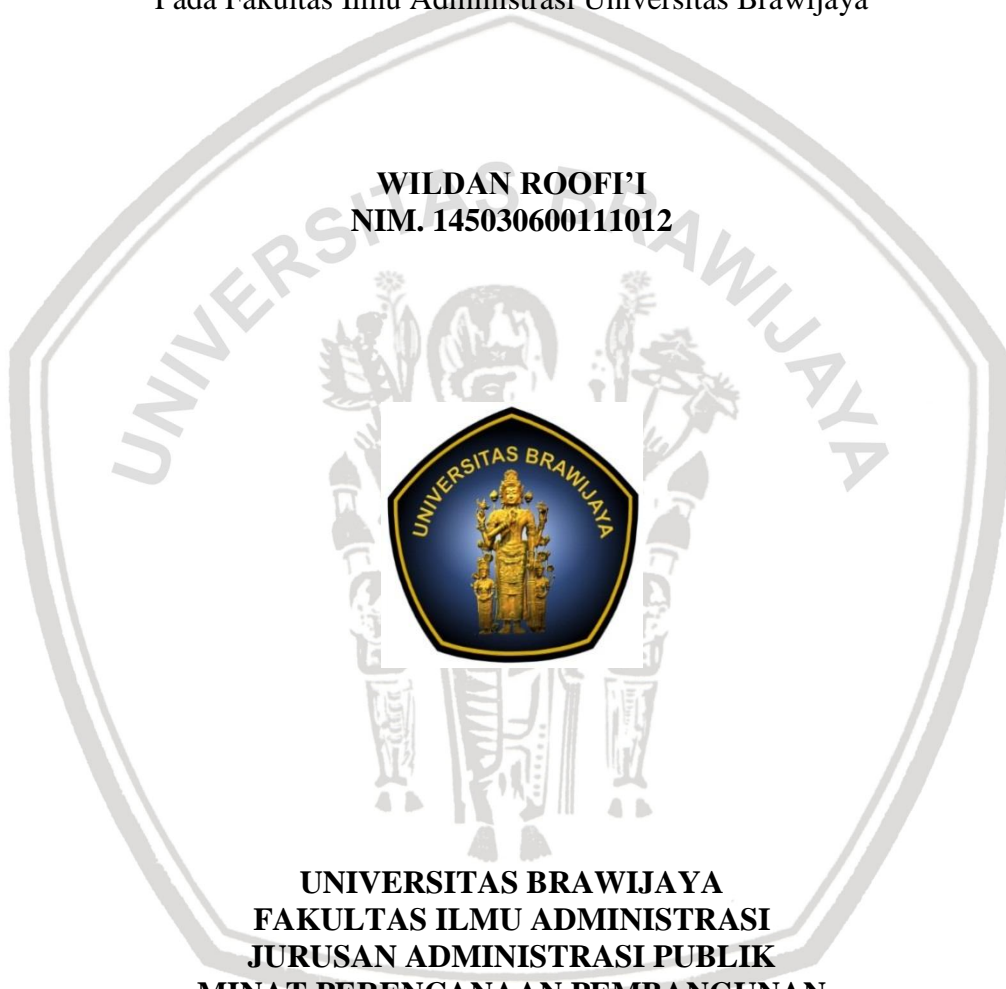
# **PERAN PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA**

**(Studi Pada Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)**

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**WILDAN ROOFI'I**  
**NIM. 145030600111012**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**  
**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**  
**MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**MALANG**  
**2018**

## TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 19 April 2018

Jam : 09.00

Skripsi atas nama: Wildan Roofi'i

Judul : Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan Desa  
(Studi Pada Desa Karangpatihan Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo)

Dan dinyatakan **LULUS**

### MAJELSI PENGUJI

Ketua



**(Dr. Tjahjanulin Domai, MS)**  
**NIP. 19531222 198010 1 001**

Anggota



**(Dr. Mohammad Nuh, S.IP, M.Si)**  
**NIP. 19710828 200604 1 001**

Anggota



**(Drs. Stefanus Pani Rengu, M.AP)**  
**NIP. 19531113 198212 1 001**

# MOTTO

**“YAA ALLAH, DENGAN  
SEMAKIN BERTAMBAHNYA  
ILMUKU, JANGAN KAU  
CONGKAKKAN HATIKU”**  
(WILDAN ROOFI’I)



## Persembahan

Terima kasih atas doa dan dukungan kedua orang tua yang selalu diberikan hingga saya sampai pada tahap ini.

Saya persembahkan skripsi ini utamanya kepada kedua orang tuaku (Bapak Taris Kumbayani dan Ibuk Katmini). Saya persembahkan juga skripsi ini kepada seluruh keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan tak lupa saya persembahkan skripsi ini kepada seluruh pihak yang telah membantu saya hingga memperoleh gelar sarjana.

Terima kasih dan mohon doa restunya agar setiap langkah saya selalu dalam lindungan ALLAH SWT.



## RINGKASAN

Wildan Roofi'i, 2017. **Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) Dalam Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)**. Dr. Tjahjanulin Domai, MS. 110 hlm + xvi.

Amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur sistem pemerintahan yang desentralisasi. Melalui desentralisasi pemerintah mendorong agar otonomi daerah digunakan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan, mengembangkan kehidupan demokrasi dan pemerataan pembangunan, sehingga dapat memajukan pembangunan nasional. Melalui NAWACITA pada point 3 pemerintah berupaya untuk melaksanakan pembangunan dari pinggir dengan memperkuat daerah-daerah desa dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini semakin mempertegas amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pembangunan desa adalah integral dari pembangunan nasional. Desa memiliki hak dan kewenangan dalam mengelola keuangan desa dan pembangunan desa. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya PLD diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015. Banyak permasalahan yang muncul terkait dengan pelaksanaan pendampingan desa. Permasalahan tersebut muncul karena pendamping lokal desa tidak memahami tugas dan fungsinya, kurangnya koordinasi dengan pendamping di atasnya, rendahnya kemampuan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaporan dll.

Peneliti ingin melihat sejauh mana peran pendamping lokal desa dalam pembangunan desa sekaligus menggali informasi apa penghambat dalam pelaksanaan pendampingan desa dalam pembangunan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengambilan data menggunakan observasi wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan peneliti menggunakan analisis dari Miles, Huberman & Saldana. Dalam menentukan validitas dan reliabilitas peneliti menggunakan teknik keabsahan data triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran fasilitasi, edukasi, teknis, perwakilan pendamping lokal desa dalam pembangunan Desa Karangpatihan dirasa sudah cukup optimal, melihat tanggung jawab untuk mendampingi 4 desa lainnya. Optimalnya peran pendamping lokal desa dapat dilihat pada kegiatan perencanaan yang telah menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDs).

**Kata Kunci: Peran, Pendamping Lokal Desa (PLD), Pembangunan Desa**

## SUMMARY

Wildan Roofi'i, 2017. The Role of Local Village Counselor In The Village Development (Study at Karangpatihan Village, District of Balong, Ponorogo Regency). Dr. Tjahjanulin Domai, MS. 110 pages + xvi.

According to the mandate of Law Number 23 Year 2014 on Regional Governance that set up a decentralized system of governance. Through decentralization the government encourages regional autonomy to be used as an effort to improve the quality of service and welfare, develop the life of democracy and development equity, so that it can advance the national development. Through NAWACITA on the third point, the government strives to implement the development from the border side of the country by strengthening the village areas within the framework of a unitary state. This further reinforces the mandate of Law No. 6 of 2014 that village development is an integral to national development. Villages have deep rights and authority to manage its finances and development. In performing the task and the function of PLD, it is regulated in the Regulation of the Minister of Village, Disadvantaged Regions and Transmigration No. 3 of 2015. Many problems are related with the implementation of village assistance. The problem arises because local village counselors do not understand the duties and functions, there's a lack of coordination with the upper counselor, low internal ability of planning, management, reporting etc.

Researcher would like to see how far the role of local village counselors in the village development and digging out the information about the inhibitions in the implementation of village counselors in development.

This research is a descriptive research with qualitative approach. Methods of data retrieval used by researcher are interview observation and documentation. The analytical technique used by researcher is analysis from Miles, Huberman & Saldana. In determining the validity and reliability of data, the researcher used triangulation data source as the technique of data validation.

The results of this study indicate that the role of local village counselors in the development of Karangpatihan Village is considered optimal, considering that the responsibility to counsel the other 4 villages. The optimal role of local village counselors can be seen in the planning activities that have resulted in the Village Government Work Plan (RKPDs).

**Keyword: Role, Local Village Counselor, Village Development**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis penjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Karangpatihan Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo)”**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik (S.AP) pada Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
3. Bapak Dr. Hermawan, S.IP, M.Si selaku Ketua Minat Perencanaan Pembangunan.
4. Bapak Dr. Tjahjanulin Domai, M.S selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan dengan sabar memberikan petunjuk serta arahan dalam penulisan skripsi ini hingga dapat terselesaikan.
5. Teman-teman Perencanaan Pembangunan angkatan Tahun 2014 yang selama 3.5+ tahun ini selalu memberikan semangat dan dukungan untuk berjuang bersama-sama selama kuliah untuk meraih gelar Sarjana.
6. Seluruh teman-teman yang tidak bisa penulis sebut satu per satu, terima kasih atas dukungan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Penulis

Malang, 24 Februari 201





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Sistematika penulisan.....	15

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu .....	17
1. Amelyana Agustin, Sjamsiar Sjamsudana desain dan Ratih Nur Pratiwi .....	17
2. Hasyemi Rafsanjani, Bambang Supriyono, Suwondo .....	18
B. Konsep Pembangunan Desa .....	19
1. Pengertian Pembangunan Desa .....	19
2. Tujuan Pembangunan Desa .....	20
3. Strategi Pembangunan Desa .....	22
C. Kewenangan Desa dan Pemerintahan Desa .....	24
1. Kewenangan Desa .....	25
2. Pemerintahan Desa .....	27
D. Peran Pendamping Desa.....	28
1. Pengertian Peran.....	28
2. Peraturan Perundang-undangan Pendampingan Desa.....	31
3. Pengertian Pendampingan Desa .....	32

4. Pendamping Desa .....	34
--------------------------	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Fokus Penelitian.....	37
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	40
1. Jenis Data .....	40
2. Sumber Data.....	42
E. Instrumen Penelitian .....	44
F. Analisis Data .....	45

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	48
1. Gambaran Umum Kabupaten Ponorogo .....	48
a. Keadaan Demografi.....	49
b. Kondisi Sosial dan Ekonomi .....	50
c. Pemerintahan Kabupaten Ponorogo .....	51
2. Gambaran Umum Desa Karangpatihan .....	54
a. Keadaan Demografi.....	54
b. Kondisi sosial ekonomi .....	54
c. Pemerintahan Desa Karangpatihan .....	55
d. Keadaan Infrastruktur dan Utilitas .....	58
B. Penyajian Hasil Data Fokus Penelitian .....	63
1. Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam Pembangunan Desa .....	63
a. Peran Fasilitasi dan Edukasi Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan ...	63
b. Peran Teknis Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur .....	68
c. Peran Perwakilan Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan.....	73
2. Faktor Penghambat Peran Pendamping Lokal (PLD) Desa dalam Pendampingan Pembangunan Desa .....	78
C. Analisis Data dan Pembahasan .....	82
1. Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam Pembangunan Desa .....	82
a. Peran Fasilitasi dan Edukasi Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan ...	82
b. Peran Teknis Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur .....	87
c. Peran Perwakilan Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan.....	91
2. Faktor Penghambat Peran Pendamping Lokal (PLD) Desa Dalam Pendampingan Pembangunan Desa .....	94

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	96
B. Saran.....	97

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>98</b>
----------------------------	-----------



**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.</b> Permasalahan dan Kasus PLD .....	10
<b>Tabel 2.</b> PLD Kecamatan Balong .....	12
<b>Tabel 3.</b> Data Sekunder.....	40
<b>Tabel 4.</b> Informan Penelitian.....	43
<b>Tabel 5.</b> Komoditi Hasil Bumi Kabupaten Ponorogo.....	50
<b>Tabel 6.</b> Data Penduduk Desa Karangpatihan .....	54
<b>Tabel 7.</b> Data Monografi Sumberdaya Ekonomi .....	55
<b>Tabel 8.</b> Data Kondisi Jalan Desa Karangpatihan Balong.....	58
<b>Tabel 9.</b> Kondisi Drainase Desa Karangpatihan .....	59
<b>Tabel 10.</b> Kondisi Pengguna Sumber Air Bersih Desa Karangpatihan.....	60
<b>Tabel 11.</b> Data Monografi Sumberdaya Alam .....	61
<b>Tabel 12.</b> Fasilitas Pendidikan .....	62

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Nawacita 2014-2019.....	4
<b>Gambar 2.</b> Model Analisis.....	46
<b>Gambar 3.</b> Peta Kabupaten Ponorogo .....	49
<b>Gambar 4.</b> Data Aparatur Sipil Negeri di Kabupaten Ponorogo .....	52
<b>Gambar 5.</b> Peta Desa Karangpatihan.....	56
<b>Gambar 6.</b> Stuktur Organisasi Desa Karangpatihan.....	57
<b>Gambar 7.</b> APBDes 2017 .....	61
<b>Gambar 8.</b> Pertemuan Rutin Masyarakat daam Penggalan Data .....	65
<b>Gambar 9.</b> Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes) 2017 .....	68
<b>Gambar 10.</b> Realisasi Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2017 .....	70
<b>Gambar 11.</b> Informasi Pelayanan Kesehatan Melalui Posyandu .....	74

## LAMPIRAN

**Lampiran 1.** Surat Penelitian

**Lampiran 2.** Lampiran Gambar:

- a. Gambar dokumen RKPDes, APBDes, dan RAPBDes
- b. Gambar penelitian





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan wilayah terluas di kawasan Asia Tenggara dengan luas sebesar 1.913.578,68 km<sup>2</sup> ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Indonesia memiliki 34 provinsi dan 542 daerah otonom kota/kabupaten yang tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke ([www.otda.kemendagri](http://www.otda.kemendagri)). Kondisi geografis ini menjadi pengaruh besar terhadap penerapan sistem desentralisasi sebagai sistem pemerintahan yang digunakan oleh pemerintah di Indonesia. Sistem pemerintahan desentralisasi diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Adanya desentralisasi mendorong bagi pemerintah daerah agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat berdampak baik bagi pembangunan daerah sehingga daerah-daerah yang tertinggal dapat berkembang menuju daerah maju. Pembangunan daerah yang berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakatnya, secara tidak langsung dapat memajukan pembangunan nasional. Pernyataan ini sejalan dengan Kaho (1997:12) yang menjelaskan bahwa tujuan desentralisasi adalah untuk:

- a. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat.
- b. Menghadapi masalah yang amat mendesak membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu intruksi dari pemerintah pusat.
- c. Mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan.

- d. Desentralisasi dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan tertentu, khususnya.
- e. Desentralisasi teritorial dapat lebih mudah menyesuaikan diri kepada kebutuhan dan kebutuhan khusus daerah.
- f. Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat.
- g. Dari segi psikologis desentralisasi dapat memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya yang lebih langsung.

Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui desentralisasi telah mengalami perkembangan sejak Indonesia merdeka. Penerapan sistem desentralisasi pada pemerintahan daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan desentralisasi perlunya memahami aspirasi serta kebijakan yang berkembang di daerah agar dapat berinovasi dan berkeaktivitas dalam rangka pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan desentralisasi tidak hanya mencakup penyelenggaraan pemerintahan, namun juga mencakup pembangunan daerah dan segala urusan yang berkenaan dengan daerah, sehingga setiap pemerintah daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kondisi pada masing-masing daerah.

Otonomi daerah merupakan kebijakan untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih mandiri, baik kemandirian dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, kemandirian mengelola sumber daya yang dimiliki, maupun kemandirian untuk meningkatkan pembangunan daerah. Sistem otonomi daerah di Indonesia menganut sistem otonomi bertingkat. Provinsi memiliki otonomi yang terbatas, kabupaten/kota memiliki otonomi yang luas,

dan desa memiliki otonomi asli. Otonomi daerah secara keseluruhan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal I ayat (2) menyebutkan bahwa:

“pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan oleh pemerintah daerah dan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan berdemokrasi, pemerataan pembangunan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terpilihnya Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia periode tahun 2014-2019 membawa visi besar pembangunan Indonesia, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi besar tersebut dicapai melalui rangkaian misi yang terurai didalam NAWACITA Joko Widodo dan Jusuf Kalla tahun 2014-tahun 2019. Upaya Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah senantiasa berpedoman pada NAWACITA sehingga dapat mewujudkan visi besar pembangunan Indonesia.



**Gambar 1. NAWACITA 2014-2019**

Sumber: <http://mandalahurip.desa.id/nawacita-jokowi/>

Visi Pemerintah melalui NAWACITA Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla 2014-2019 pada point ke tiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Berdasarkan point tiga yang tertuang didalam NAWACITA, menunjukkan keberpihakan bahwa pembangunan perlu untuk diprioritaskan dari pinggir, salah satunya pembangunan dari desa. Desa merupakan pemerintahan daerah terendah di dalam kabupaten/kota, serta pemerintahan yang paling dekat dari masyarakat.

Desa memiliki hak otonomi asli yang berdasarkan hak asal-usul desa, yang membuat desa dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya. Menurut Widjaja (2005:165) otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta urusan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota diserahkan pengaturannya kepada pemerintah desa. Adanya otonomi desa



membuat pemerintah desa memiliki tanggung jawab yang besar dan kewenangan yang besar pula dalam pengelolaan aset sebagai sumber daya pembangunan. Harapan yang besar masyarakat desa untuk segera menikmati pembangunan menuntut pemerintah desa dapat mengelola sumberdaya yang dimiliki desa untuk digunakan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 121 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa “pelaksanaan pembangunan mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat”. Hal ini juga di perkuat oleh turunnnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 1 Ayat (9) menyebutkan bahwa “pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.

Berdasarkan hal tersebut, desa dirasa perlu memperkuat eksistensinya sebagai pemerintahan paling depan dan paling dekat dengan masyarakat. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah menguatkan desa sebagai kawasan yang otonom dengan hak-hak istimewanya. Kewenangan desa diharapkan dapat mendorong desa menjadi mandiri dengan menyelenggarakan pemerintahan dan dapat mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial bagi masyarakat desa. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh desa ialah hak untuk mengelola keuangan desa yang bersumber dari dana desa.

Desa berhak untuk mengatur keuangannya sendiri seperti halnya amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 7 Ayat (2) bahwa “desa memiliki hak untuk mengelola keuangannya yang mana pengelolaan dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan desa”. Hal ini juga diperkuat dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 133 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu “menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes dan menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes”.

Dalam melaksanakan pengelolaan APBDes, desa dibantu oleh pendamping desa yang salah satu point tugasnya ialah membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Pendamping desa sangat dibutuhkan dalam mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan dan pengelolaan keuangan desa. Dibentuknya pendamping desa adalah sebagai upaya pemerintah untuk mendampingi pemerintah desa dalam menggunakan dana desa sebagai sumber pembangunan di desa. Pendamping desa juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penggunaan dana desa yang digunakan oleh pemerintah desa. Bukan hanya itu saja, adanya pendamping desa ialah sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di desa. Dalam upaya itu maka pendamping desa perlu bergerak cepat untuk mendampingi desa dalam mengelola kewenangan dan keuangan desa yang besar guna



mengurangi kemiskinan melalui percepatan pembangunan di desa. Pendamping desa diatur oleh Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa.
- b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam membangun desa yang partisipatif.
- c. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor.
- d. Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Pendampingan dalam pembangunan desa perlu mendorong pemerintah desa untuk segera melaksanakan pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kearifan lokal yang ada. Pendamping desa diharapkan memberi pengetahuan pengelolaan dana desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan tidak terjadi kegiatan melawan hukum. Kewenangan yang dimiliki oleh desa begitu luas, sumber keuangan desa yang besar, dan kualitas sumber daya aparatur desa yang dirasa masih kurang, maka hal ini memberikan tanggung jawab lebih kepada pendamping desa agar dalam mendampingi pelaksanaan pembangunan tidak terjadi diskresi dalam mengambil keputusan oleh pemerintah desa. Dalam pembangunan desa, pembangunan masyarakat tidak dapat dikesampingkan karena nantinya masyarakat adalah subyek pembangunan. Upaya pembangunan masyarakat ialah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan

yang lebih baik dan taraf hidup yang berkualitas. Pendamping desa memiliki pengaruh yang besar dalam proses pembangunan desa seperti menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal tersebut akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kapasitas pemerintah desa, dan lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan masyarakat. Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Keberlanjutan pembangunan di desa perlu untuk diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia perdesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara terus-menerus berlandaskan pada potensi dan kemampuan desa.

Ruang lingkup pendampingan desa dilaksanakan secara berjenjang, pendampingan desa dilaksanakan oleh pendamping desa, yang terdiri atas tenaga pendamping profesional yang meliputi (pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan dan desa), (pendamping teknis yang berkedudukan di kabupaten) dan (tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang berkedudukan di pusat atau provinsi), kader pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan (Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Pengrajin, Kelompok Perempuan, Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak, Kelompok Masyarakat Miskin dan Kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa yang berkedudukan di desa), dan pihak ketiga (Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, Perusahaan).

Tenaga pendamping profesional yang berkedudukan di desa disebut Pendamping Lokal Desa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 129 Ayat 1 bahwa tenaga pendamping lokal desa bertugas di desa untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, pengembangan BUMDes, dan pembangunan yang berskala desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menuntut kepada para pendamping desa untuk melakukan transformasi sosial dengan mengubah secara mendasar pendekatan kontrol dan mobilisasi pemerintah terhadap desa menjadi pendekatan pemberdayaan masyarakat desa. Masyarakat desa dan pemerintah desa sebagai kesatuan *self governing community* diharapkan mampu hadir sebagai komunitas yang mandiri. Desa didorong menjadi subyek penggerak pembangunan Indonesia dari pinggiran, sehingga dapat merealisasikan salah satu point strategis prioritas pemerintah yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan sesuai dengan misi pada point ke tiga dari NAWACITA.

Sampai saat ini masih banyak ditemui permasalahan dalam implementasi pendamping desa. Permasalahan tersebut muncul karena belum maksimalnya pendampingan yang dilakukan oleh pendamping desa. Berikut merupakan permasalahan yang berkaitan dengan pendamping desa

berdasarkan hasil kajian yang peneliti lakukan di Provinsi Jawa Timur, permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Permasalahan dan Kasus Pendamping Lokal Desa di Jawa Timur**

No	Lokasi	Permasalahan	Sumber
1	Kabupaten Bondowoso	Pendamping lokal desa melakukan protes saat rakor antara tenaga ahli dengan pendamping desa yang digelar di aula bapemas, koordinator pendamping lokal desa menuding pendamping desa selama ini cenderung berjalan sendiri tanpa koordinasi dengan pendamping lokal desa.	Kalia, Ika.2016 <i>Kisruh PD dan PLD di Bondowoso, Pembangunan Desa Bisa Terganggu.</i> <a href="http://www.jatimtimes.com">www.jatimtimes.com</a>
2	Kabupaten Sampang	Kinerja pendamping desa dan pendamping lokal desa dalam pengelolaan dana desa dinilai masih lemah, terutama dari segi pendampingan administrasi desa. Kemudian adanya kelalaian pendamping dan pendamping lokal desa dalam pengelolaan dana desa sehingga terjadi kasus dugaan pemotongan Dana Desa hingga terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Polda Jatim.	Repdel. 2016. <i>Kinerja Pendamping Desa Perlu Dievaluasi.</i> <a href="http://www.skhmemorandum.com">www.skhmemorandum.com</a>
3	Kabupaten Jombang	Kurang optimalnya pendampingan yang dilakukan oleh pendamping lokal desa, 99% pendamping lokal desa tidak memberikan kontribusi dalam pembangunan desa.	_____. 2016. <i>Pendamping Desa Dituding Mlempem, Tenaga Ahli Ajak Kades Lapor untk Evaluasi Kinerja.</i> <a href="http://www.bangsaonline.com">www.bangsaonline.com</a>
4	Kabupaten Gresik	Pendamping lokal desa tidak mengetahui tentang administrasi dan cara pencairan dana desa, padahal pendamping lokal desa disiapkan untk mendampingi Kades mengurus dana desa mulai dari tahap perencanaan,	Amaludin. 2016. <i>Kinerja PLD, Kades: Mereka malah Tolah toleh Bingung</i> <a href="http://www.metrotvnews.com/jatim/">www.metrotvnews.com/jatim/</a>

		pengelolaan, dan pelaporan dana desa.	
--	--	---------------------------------------	--

Sumber: Olahan penulis, 2017

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan berbagai permasalahan mengenai peran pendamping desa yang ada di Provinsi Jawa Timur, yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendamping lokal desa dalam melakukan pendampingan pengelolaan dana desa tidak dilakukan secara optimal.
2. Pendamping lokal desa tidak memahami tugas dan fungsinya dalam urusan administrasi pemerintah desa.
3. Rendahnya kemampuan yang dimiliki oleh pendamping lokal desa untuk mendampingi pemerintah desa dalam perencanaan, pengelolaan, pelaporan, dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
4. Kurangnya koordinasi antara pendamping lokal desa dan pendamping desa dengan pihak kecamatan sehingga terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas.
5. Kontribusi minimal dalam pengelolaan dana desa mengakibatkan kasus penyelewengan dana desa yang mengindikasikan lemahnya peran pendamping lokal desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pada penelitian ini peneliti lebih berfokus pada peran PLD dalam pembangunan desa. Kecamatan Balong terdiri dari 20 desa, sehingga hal itu pula membawa kecamatan ini berada dalam peringkat kecamatan paling



banyak nomor 2 membawahi desa di Kabupaten Ponorogo. Potensi besar munculnya permasalahan terkait dengan pendampingan PLD sewaktu-waktu bisa terjadi di Kecamatan Balong. Jumlah PLD di Kecamatan Balong saat ini hanya berjumlah 4 orang, sedang ada sejumlah 20 desa yang membutuhkan pendampingan dalam pengelolaan, perencanaan, pembangunan, dan penggunaan dana desa. Berikut data pendamping lokal desa yang ada di Kecamatan Balong.

**Tabel 2**  
**Pendamping Lokal Desa Kecamatan Balong**

No	Pendamping Lokal Desa	Desa
1	Dika	Ds. Ngraket, Ds. Pandak, Ds. Jalen, Ds. Sedarat, Ds. Karangmojo
2	Eka	Ds. Bajang, Ds. Karang, Ds. Balong, Ds. Singkil, Ds. Ngumpul
3	Endah	Ds. Tatung, Ds. Muneng, Ds. Ngampel, Ds. Purworejo, Ds. Bulukidul
4	Nur Cholis	Ds. Bulak, Ds. Sumberejo, Ds. ngendut, Ds. Dadapan, Ds. Karangpatihan

Sumber : Olahan Penulis 2018

Desa Karangpatihan merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Desa Karangpatihan terletak paling barat dari wilayah administrasi Kecamatan Balong. Dana Desa paling besar di Kecamatan Balong diterima oleh Desa Karangpatihan yaitu sebesar Rp. 875.417.000,00 pada tahun 2017, besaran tersebut diterima oleh pemerintah Desa Karangptihan karena jumlah wilayah dan jumlah penduduk yang ada sangat besar jika dibandingkan dengan desa lain di wilayah administrasi Kecamatan Balong. Indeks Desa Membangun (IDM) yang didapatkan oleh Desa Karangpatihan ialah sebagai desa



berkembang. Desa berkembang yang disandang oleh Desa Karangpatihan didasarkan pada banyaknya kegiatan pemberdayaan yang dimotori oleh pemerintah desa. Namun Desa Karangpatihan kerap kali dikenal oleh masyarakat sebagai kampung idiot, julukan ini di latar belakang karena sebagian masyarakatnya menderita keterbelakangan mental (tuna grahita). Percepatan pembangunan di Desa Karangpatihan sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa agar kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat.

Peneliti melihat perkembangan pembangunan perdesaan di Desa Karangpatihan sebagai realita yang menarik untuk dikaji. Permasalahan yang ingin di kaji oleh penulis yaitu tentang pelaksanaan pendampingan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong. Penulis akan mengkaji secara khusus mengenai peran tenaga pendamping profesional yaitu Pendamping Desa berkedudukan di desa dalam pembangunan Desa Karangpatihan. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Karangpatihan Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan digunakan sebagai rumusan masalah pada penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pendamping lokal desa (PLD) dalam pembangunan Desa Karangpatihan Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo?
2. Apa faktor penghambat pendamping lokal desa (PLD) dalam melaksanakan pendampingan pembangunan Desa Karangpatihan Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan mengenai peran pendamping desa dalam pembangunan Desa Karangpatihan Kecamatan Balong, maka tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisa peran pendamping lokal desa dalam pembangunan Desa Karangpatihan Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.
2. Mendeskripsikan dan menganalisa faktor penghambat pendamping lokal desa dalam melaksanakan pendampingan pembangunan Desa Karangpatihan Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Seluruh informasi yang telah dikumpulkan melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik bagi penulis, pendamping desa, pemerintah desa dan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam pembangunan desa. Beberapa manfaat dari penulisan ini antara lain adalah:

### 1. Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang peran dari pendamping lokal desa dalam pendampingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan informasi bagi peneliti lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

## **E. Sistematika Penulisan**

**BAB I :** Menguraikan tentang latar belakang dari penulisan skripsi terkait peran lokal pendamping desa dalam pembangunan Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Dalam bab ini juga penulis menguraikan tujuan penelitian dan kontribusi dari penelitian ini baik secara akademis maupun praktis.

**BAB II :** Menguraikan tentang kajian teori yang berhubungan dengan tema penulisan skripsi antara lain teori yang berkaitan dengan peran pendamping lokal desa dalam pembangunan Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

**BAB III :** Menguraikan mengenai metodologi penelitian yaitu jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, lokasi yang berada di Kabupaten Ponorogo dan situs penelitian di Desa Karangpatihan, fokus-fokus penelitian yang terkait dengan peran pendamping lokal desa di Desa Karangpatihan dalam pembangunan desa, sumber data baik primer maupun sekunder, teknik pengumpulan data seperti wawancara dan dokumentasi,

instrumen penelitian seperti peneliti dan pedoman wawancara serta alat dokumentasi, penggunaan analisis data dari Miles, Huberman & Saldana, dan keabsahan menggunakan triangulasi sumber.

BAB IV : Menguraikan gambaran umum lokasi dan situs penelitian, menyajikan hasil data fokus penelitian, menyajikan analisi dan pembahasan.

BAB V : Menguraikan kesimpulan dan saran penelitian.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

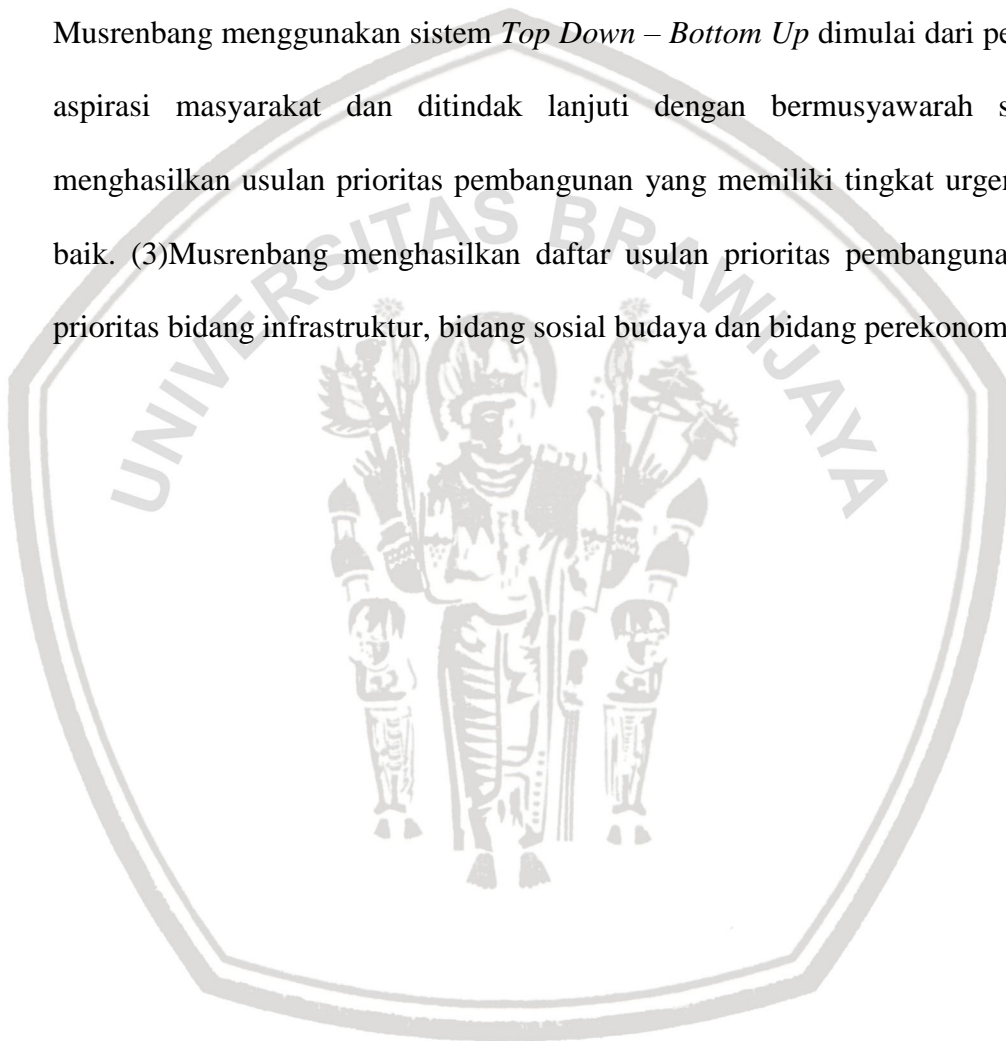
#### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian ini, peneliti menemukan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Berikut adalah penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai informasi:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Amelyana Agustin, Sjamsiar Sjamsuddin dan Ratih Nur Pratiwi dalam Jurnal Administrasi Publik dengan judul Efektivitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa penggunaan anggaran dalam pembangunan fisik di Desa Pucangro serta bagaimana faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung pembangunan Desa Pucangro pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagian dibantu oleh swadaya masyarakat sehingga pembangunan yang dilaksanakan berjalan cepat dan hasil pembangunan dapat segera digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Faktor penghambat dalam pembangunan fisik di Desa Pucangro ialah pendanaan yang digunakan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan sangat terbatas sehingga banyak proyek percepatan pembangunan fisik ditunda untuk dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Penelitian oleh Hasyemi Rafsanjani, Bambang Supriyono, dan Suwondo dalam Jurnal Administrasi Publik dengan Judul Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Penelitian ini



bertujuan untuk menggambarkan kemitraan yang dilakukan oleh LPMD dengan Kepala Desa guna bersama-sama menyusun perencanaan pembangunan yang nantinya dapat mempromosikan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan kerja sama antar organisasi di Desa Sumber Ngepoh. Hasil penelitian ini ialah (1)Proses perencanaan pembangunan di Desa Sumber Ngepoh, LPMD dan Kepala Desa bersama-sama dan bekerja sama untuk menyusun perencanaan. (2)Pelaksanaan Musrenbang menggunakan sistem *Top Down – Bottom Up* dimulai dari pendataan aspirasi masyarakat dan ditindak lanjuti dengan bermusyawarah sehingga menghasilkan usulan prioritas pembangunan yang memiliki tingkat urgensi yang baik. (3)Musrenbang menghasilkan daftar usulan prioritas pembangunan yaitu: prioritas bidang infrastruktur, bidang sosial budaya dan bidang perekonomian.



## B. Konsep Pembangunan Desa

### 1. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan integral dari pembangunan secara nasional, maka pembangunan desa perlu diperhatikan agar berjalan dengan baik sehingga dapat memberikan cerminan yang baik bagi Bangsa Indonesia. Pelaksanaan pembangunan desa mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan (Adisasmita, 2006:3). Pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia perdesaan yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pada potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh desa.

Filosofi pembangunan yang bertumpu pada paradigma klasik (*trickle down effect*) merupakan mekanisme pembangunan yang bersifat *top down*. Konsep tersebut dilandasi oleh sasaran pertumbuhan yang tinggi lewat peningkatan produktivitas dan kompleksitas produksi (*production development centre*) (Adisasmita, 2013:4).

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam konteks pembangunan nasional karena mencakup bagian terbesar dari wilayah nasional. Pembangunan masyarakat desa perlu ditingkatkan karena sebagai penunjang pembangunan desa. Upaya pembangunan masyarakat desa dilakukan melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang ada di perdesaan sehingga kreativitas dan aktivitas masyarakat desa semakin berkembang serta kesadaran lingkungannya semakin meningkat.

Pemerintah desa memiliki peranan yang besar dalam mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan. Hal itu dapat dilakukan melalui penyampaian pesan-pesan pembangunan, pengarahan pada masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Partisipasi

masyarakat diwujudkan dalam bentuk pengarahannya dan pemanfaatan dana serta sumber daya yang ada di dalam masyarakat untuk meningkatkan kegiatan pembangunan. Berdasarkan pengertian mengenai pembangunan desa tersebut, dapat dimaknai bahwa pembangunan desa ialah sebuah konsep pembangunan yang berbasis pada pedesaan dengan tetap memperhatikan ciri khas sosial budaya masyarakat yang tinggal.

## 2. Tujuan Pembangunan Desa

Tujuan pembangunan desa dapat dibagi menjadi pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka pendek ialah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh desa. Tujuan desa jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional (Adisasmita, 2013:57).

Pembangunan desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong-royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Menurut Adisasmita (2006:22) bahwa pembangunan desa secara spasial dapat dirumuskan yaitu terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan

lingkungan, selaras, serasi dan bersinergi dengan kawasan-kawasan pedesaan lain melalui pembangunan komprehensif dan berkelanjutan untuk terwujudnya masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera. Pada hakekatnya tujuan umum dari pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat perdesaan melalui capaian kemajuan sosial dan ekonomi secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan persamaan hak serta menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat. Pembangunan desa dapat dimaknai sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

### 3. Strategi Pembangunan Desa

Pembangunan masyarakat desa merupakan bagian dari pembangunan yang diarahkan pada pembangunan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah perdesaan. Negara menerapkan strategi pembangunan untuk memecahkan masalah yang dihadapi terutama menyangkut pertumbuhan penduduk, kemiskinan, urbanisasi, dan pengangguran masyarakat.

Guna mewujudkan tujuan dari pembangunan desa, terdapat empat jenis strategi menurut Adisasmita (2013:76) yaitu:

- a. Strategi Pertumbuhan (*The Growth Strategy*) Strategi pertumbuhan dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis melalui peningkatan pendapatan penduduk, produktivitas sektor pertanian, permodalan, kesempatan kerja dan peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat desa.
- b. Strategi Kesejahteraan (*The Welfare Strategy*) Strategi kesejahteraan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan penduduk perdesaan melalui pelayanan dan peningkatan program-program pembangunan sosial yang berskala besar atau nasional.
- c. Strategi Tanggap Terhadap Kebutuhan Masyarakat (*The Responsive Strategy*). Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang di maksudkan untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar (*self need and assistance*) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi dan tersedianya sumber-sumber daya yang sesuai kebutuhan di desa.

- d. Strategi Terpadu Menyeluruh (*The Integrated Or Holistic Strategy*) Strategi terpadu dan menyeluruh tersebut ingin mencapai tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat secara simultan dalam proses pembangunan perdesaan.

Penjelasan mengenai strategi pembangunan desa tersebut, dapat dimaknai bahwa strategi pembangunan desa dimaksudkan agar kemandirian desa serta tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Maka pembangunan desa perlu direncanakan secara sadar dan berkelanjutan agar kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud.

Pemberdayaan masyarakat ialah salah satu strategi yang dapat digunakan dalam membangun desa yang mensejahterakan masyarakatnya. Ide utama pemberdayaan berkaitan erat dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Kekuasaan hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia, dengan pemahaman kekuasaan seperti ini maka pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan yang memiliki konsep bermakna. Kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Pemberdayaan dapat dilakukan apabila terjadi perubahan kekuasaan.
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang dinamis.

Menurut Prinawati dan Abubakar (2009:120) Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu yang mengalami ketidakberdayaan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan/pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi



kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya.

### C. Kewenangan Desa dan Pemerintahan Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Menurut Widjaja (2005;165) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

## 1. Kewenangan Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengamanatkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga disebutkan bahwa kewenangan desa yaitu:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa telah dijelaskan bahwa:

a. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas:

1. Sistem organisasi masyarakat adat.
2. Pembinaan kelembagaan masyarakat.
3. Pembinaan lembaga dan hukum adat.
4. Pengelolaan tanah kas desa.
5. Pengembangan peran masyarakat desa.

b. Kewenangan lokal berskala desa paling sedikit terdiri atas kewenangan:

1. Pengelolaan tambatan perahu.
2. Pengelolaan pasar desa.
3. Pengelolaan tempat pemandian umum.
4. Pengelolaan jaringan irigasi.
5. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa.
6. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu.

7. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar.
8. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan.
9. Pengelolaan embung desa.
10. Pengelolaan air minum berskala desa.
11. Pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Desa memiliki kewajiban yaitu:

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa.
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Tujuan pembentukan desa, adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan pada tingkat akar rumput, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga. Kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat. Ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun. Keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa. Kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

## 2. Pemerintahan Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang

disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Unsur penting dari desa yaitu kepala desa sebagai penguasa tunggal dalam pemerintahan desa, ia adalah penyelenggara urusan rumah tangga desa dan urusan-urusan pemerintah, dalam pelaksanaan tugasnya harus memperhatikan pendapat desa. Pelaksanaan tugas kepala desa dibantu oleh perangkat desa, sedangkan untuk hal-hal yang penting kepala desa harus tunduk pada rapat desa atau musyawarah desa.

Desa dipandang sebagai pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa, serta proses pembangunan desa. Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah. Pemerintah berkewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Kedudukan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sehingga desa memiliki kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya.

#### **D. Peran Pendamping Desa**

##### **1. Pengertian Peran**

Peranan diartikan oleh Soekanto (1990:39) sebagai aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu seseorang melakukan tindakan atau gerak perubahan dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan



atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan, dari fasilitas yang dimiliki. Pelaku perubahan memiliki peranan yang penting dalam pembangunan desa melalui pemberdayaan, hal tersebut dikarenakan masyarakat desa lebih mudah untuk melakukan sesuatu perubahan apabila ada yang mengawali terlebih dahulu. Peran pelaku perubahan dalam upaya pembangunan desa melalui pemberdayaan adalah sebagai pekerja masyarakat (*community worker*). Menurut Ife (2008:558) sekurang-kurangnya ada empat peran pelaku perubahan dalam pembangunan desa sebagai pemberdayaan masyarakat yaitu peran fasilitasi, peran edukasional, peran perwakilan, dan peran teknis. Peran fasilitasi dan edukasi sangat mendasar dan terlibat langsung dalam pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat. Berikut empat peran menurut Ife (2008:558-602):

a. Peran Fasilitasi

- 1) Animasi sosial menunjukkan bahwa kemampuan seseorang pemberdaya masyarakat dalam membangkitkan energi, aspirasi, antusiasme, menstimulasi, dan mengembangkan motivasi dari masyarakat untuk melakukan tindakan.
- 2) Mediasi dan negosiasi yaitu berkaitan dengan cara pemberdayaan masyarakat menghubungkan berbagai kelompok kepentingan, sehingga tercipta sinergi dalam komunitas.
- 3) Pemberi dukungan, yaitu memberikan dukungan baik secara materil maupun moril bagi masyarakat yang mau berkontribusi dalam aktivitas pembangunan.
- 4) Membentuk konsensus (kesepakatan) yang memiliki arti memfokuskan pencapaian tujuan bersama dengan tetap menghargai keragaman di masyarakat.
- 5) Fasilitasi kelompok, dalam memfasilitasi kelompok dilakukan secara menyeluruhan, tidak hanya beberapa kelompok saja.
- 6) Pemanfaatan sumber daya dan ketrampilan, pelaku perubahan mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki.
- 7) Mengorganisasi, berfikir mengenai strategi agar tujuan pembangunan dapat terwujud.

b. Peran Edukasional

- 1) Membangkitkan kesadaran masyarakat, dalam hal ini pelaku perubahan memotivasi masyarakat agar mau berusaha dan bertindak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
- 2) Menyampaikan informasi terkait dengan isu dan masalah yang dimiliki di dalam masyarakat.
- 3) Mengkonfrontasikan, taktik konfrontasi digunakan dalam keadaan mendesak dan perlu tindakan cepat dan tepat untuk mengeksekusi situasi.
- 4) Pelatihan, merupakan upaya memberikan ketrampilan/keahlian yang berguna bagi masyarakat dalam rangka pembangunan.



c. Peran Perwakilan

- 1) Mencari sumber daya, pelaku pemberdayaan sebagai sumber informasi yang meliputi informasi sumber daya, informasi berbagai pelayanan dan fasilitas, informasi syarat-syarat dan peraturan pemerintah dan sebagainya.
- 2) Advokasi merupakan peran untuk mendengar dan memahami permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa dalam pembangunan desa.
- 3) Memanfaatkan media ialah aktivitas yang dilakukan pelaku oleh seorang agen dalam mempromosikan/mengenalkan kegiatannya melalui wawancara pers, dialog komunikasi masa atau berpartisipasi dalam forum dialog.
- 4) Hubungan masyarakat dilakukan untuk mencari publisitas bagi kegiatan yang dijalankan sehingga masyarakat akan mengetahui sehingga dapat berdampak pada dukungan masyarakat terhadap program yang sedang dijalankan.
- 5) Mengembangkan jaringan merupakan kegiatan membangun jalinan hubungan baik dengan berbagai pihak dan mengajak mereka untuk berpartisipasi dan membantu mewujudkan perubahan.
- 6) Membagi pengetahuan dan pengalaman, pelaku pemberdayaan tidak memposisikan diri sebagai pihak yang mengetahui segalanya, selalu belajar dari pekerjaan dan pengalaman sebelumnya, baik yang dilakukan sendiri atau orang lain.

d. Peran Teknis

- 1) Mengumpulkan dan menganalisis data merupakan kegiatan yang sangat penting dalam keberlanjutan dari sebuah program yang dijalankan. Data yang diperoleh dikumpulkan dan di analisa bersama dengan masyarakat dampingan kemudian dilakukan pengkajian menggunakan metode tertentu guna keperluan pemberdayaan.
- 2) Menggunakan komputer ialah peran yang berkaitan dengan ketrampilan teknis. Peran pemberdayaan dalam menggunakan komputer dibutuhkan untuk menggunakan dan mengalihkan/mentransfer kemampuan penguasaan teknologi pada masyarakat dan pihak-pihak yang bersangkutan.
- 3) Melakukan presentasi baik secara tertulis maupun secara lisan. Pendamping menyampaikan gagasan yang berkaitan dengan proses pemberdayaan kepada masyarakat desa dalam pembangunan desa.
- 4) Pengelolaan program berkaitan dalam membangun struktur, nilai, prosedur, dan mekanisme program yang sesuai prinsip pengembangan masyarakat.
- 5) Pengelolaan keuangan mengenai peran pengelolaan dan manajemen keuangan selama pelaksanaan program dan proses pemberdayaan.

## 2. Peraturan Perundang-undangan Pendampingan Desa

Peraturan tentang pendamping desa tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. Berdasarkan peraturan menteri tersebut, pendampingan desa merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat melalui asistensi, pengordinasian,

pengarahan, dan fasilitasi desa. Pendampingan desa dilaksanakan oleh pendamping lokal desa (PLD). Pendamping lokal desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa

Perbedaan mendasar model pendampingan setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah ada tuntutan terhadap para pendamping desa agar mampu melakukan transformasi sosial dengan mengubah secara mendasar pendekatan kontrol dan mobilisasi pemerintah terhadap desa menjadi pendekatan pemberdayaan masyarakat desa. Masyarakat desa dan pemerintah desa sebagai satu kesatuan *self governing community* diberdayakan agar mampu hadir sebagai komunitas mandiri. Dengan demikian, desa didorong menjadi subyek penggerak pembangunan Indonesia dari pinggiran, sehingga mampu mewujudkan point strategis yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memandatkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk memberdayakan masyarakat desa dengan:

- a. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa.
- b. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
- c. Mengakui dan memfungsikan institusi asli atau yang sudah ada di masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan antara lain dengan pendampingan desa. Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan masyarakat desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat

daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa atau pihak ketiga.

### 3. Pengertian Pendampingan Desa

Pendampingan desa merupakan mandat undang-undang desa kepada negara dalam rangka mendorong desa yang kuat, maju, mandiri, demokratis dan sejahtera. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa, pengertian pendampingan desa diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Adapun tujuan pendampingan desa dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan desa, meliputi: 1) Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa; 2) Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif; 3) Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antar sektor; dan 4) Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris. Pendampingan sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan secara teknis pendampingan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga. Tenaga pendamping profesional sebagaimana yang dimaksud tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdiri atas:

1. Tenaga pendamping lokal desa yang bertugas di desa untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pembangunan yang berskala lokal desa.
2. Tenaga pendamping desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, pengembangan BUMDes, dan pembangunan yang berskala lokal desa.
3. Tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral.
4. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

#### 4. Pendamping Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa, pendamping desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Harapannya aset desa yang besar dapat dikelola dengan baik salah satunya melalui peran aktif dari pendamping lokal desa. Pendamping lokal desa perlu mengoptimalkan aset lokal desa secara amansipatoris. Aset lokal desa dalam penunjang pembangunan desa perlu dikelola secara optimal salah satunya ialah mensinergikan program pembangunan desa antar sektor agar pembangunan desa memberikan *multiplier effect* (suatu kegiatan yang dapat memacu kegiatan lainnya/nilai pengganda) dalam mensejahterakan masyarakat desa. Optimalisasi aset lokal desa oleh pendamping desa diperlukan sebagai penunjang percepatan pembangunan desa.



Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa dimaknai bahwasannya pendampingan kepada desa berprinsip pada upaya mengelola potensi yang ada di desa untuk dimanfaatkan guna mendorong perubahan ke arah lebih baik dari sisi ekonomi, politik, sosial dan budaya, maka pendampingan desa tidak dapat hanya dilihat dan dimaknai sebagai aktivitas membantu desa menjalankan aspek-aspek teknokratis dan administratif saja. Adapun terkait dengan tugas pendamping desa dalam melaksanakan tugas mendampingi desa, meliputi:

1. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa. Pendampingan desa sangat berpengaruh dalam pendampingan kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat. Kelompok-kelompok yang ada dalam wilayah desa perlu diorganisir agar dapat berkembang dan dapat memajukan desa.
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru. Peningkatan sumber daya manusia merupakan hal penting untuk terwujudnya pembangunan desa yang partisipatif, oleh karena itu pendamping desa perlu meningkatkan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat.



6. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif. Tidak hanya pendampingan kepada aparatur desa, pendampingan desa juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan yang berwawasan lingkungan, karena pembangunan desa dapat terwujud jika dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh aparatur desa dan seluruh masyarakat. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan topik yang diteliti, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2008:15), “data kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar”. Menurut Sugiyono (2008:11), “penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanda membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain”. Pemilihan jenis penelitian deskriptif ini guna mendeskripsikan dan menganalisis Peran Pendamping Lokal Desa dalam Pembangunan Desa serta mengetahui faktor penghambat Pendamping Lokal Desa dalam Melaksanakan Pendampingan Pembangunan Desa Karangpatihan di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

##### B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan masalah yang ada di dalam penelitian ini, dimana fokus ini berisikan tentang pokok masalah. Adanya fokus penelitian dapat membatasi apa saja yang akan diteliti dan dapat mengarahkan serta mempermudah pelaksanaan penelitian. Tanpa fokus penelitian dalam pembahasan bisa melebar

kemana-mana sehingga penelitian menjadi tidak terarah. Pandangan penelitian kualitatif gejala itu bersifat *holistik* (menyeluruh tidak dapat dipisah-pisahkan) sehingga penelitian kualitatif tidak akan menetapkan penelitian hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2016:285).

Fokus menunjukkan hubungan antara beberapa faktor dan fokus merupakan titik pusat dari permasalahan, sehingga diharapkan fokus penelitian yang diteliti lebih spesifik dan mampu menghasilkan sebuah penelitian yang baik. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa dan didasarkan pada peran yang dikemukakan oleh Ife (2008:558) yaitu peran fasilitasi, edukasi, teknis, dan perwakilan yang terdiri dari:
  - a) Peran fasilitasi dan edukasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa.
  - b) Peran teknis dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
  - c) Peran perwakilan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan.

2. Faktor penghambat Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam melaksanakan pendampingan pembangunan Desa Karangpatihan Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.

### C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti mengadakan penelitian dan mendapatkan data yang valid, akurat, dan absah sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian. Situs penelitian ialah obyek yang digunakan sebagai penelitian. Situs penelitian berkaitan dengan letak dimana obyek penelitian, tempat dimana peneliti mengetahui fenomena yang terjadi dan mengkaji fenomena yang ada.

Lokasi yang diambil dari penelitian ini berada di Kabupaten Ponorogo. Adapun yang menjadi situs pada penelitian ini yaitu Desa Karangpatihan Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Wilayah administratif Desa Karangpatihan adalah salah satu yang terluas di Kecamatan Balong. Penerimaan dana desa dari pemerintah pusat juga yang paling besar. Kompleksitas Desa Karangpatihan tidak berhenti di situ, sebagian penduduknya mengalami gangguan mental atau biasa disebut tuna grahita. Letak Desa Karangpatihan juga berada dilereng bukit, namun dengan segala kekurangan dan kelebihan desa ini memiliki pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang luar biasa. Berbagai prestasi dalam bidang pembangunan maupun pemberdayaan tingkat regional maupun nasional telah diperoleh Desa Karangpatihan. Sehingga hal ini mendorong Presiden Joko Widodo pada awal tahun 2016

berkunjung ke Desa Karangpatihan. Desa Karangpatihan termasuk desa yang banyak menjadi rujukan penelitian terkait pembangunan desa dan pemberdayaan tingkat desa. Salah satu alasannya yang kuat karena Kepala Desa Karangpatihan mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat pada tahun 2015 sebagai salah satu kepala desa terbaik di Indonesia, maka pantas jika desa ini mendapat *attention* dari berbagai kalangan dalam pembangunan desa yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Berdasarkan jenisnya, menurut Sugiyono (2016:308) bahwa data kualitatif dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

##### **a) Data primer**

Data primer merupakan sumber data peneliti yang diperoleh secara langsung yang digunakan sebagai bahan baku dalam melakukan analisis. Penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dalam kondisi alamiah, sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*). Data primer berupa wawancara langsung dengan narasumber (informan) dan observasi. Peneliti menggunakan wawancara dengan model komunikasi informal yang santai sehingga tercipta suasana wajar seperti pembicaraan biasa dalam sehari-hari. Setelah peneliti memperoleh suasana komunikasi yang santai dan kondusif, maka peneliti menggunakan



pedoman wawancara sebagai petunjuk wawancara dengan menggali informasi sesuai dengan fokus penelitian. Peneliti juga mengikuti kegiatan pertemuan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, dari sana peneliti mendapat informasi yang lebih komprehensif dan akurat terkait dengan peran pendamping lokal di Desa Karangpatihan.

Peneliti mengamati kesesuaian pembangunan yang ada di desa Karangpatihan melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dengan realitas dilapangan dan sejauh mana tugas dan peran serta pendamping lokal desa dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa. Peneliti juga mengamati peran serta pendamping lokal desa mulai dari tahap penyusunan hingga pelaporan apakah sudah berperan aktif atau belum, sekaligus peneliti menggali informasi terkait dengan kendala/hambatan apa saja yang dialami dalam pendampingan tersebut.

b) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui dokumentasi. Dokumentasi merupakan sekumpulan data atau dokumen yang dapat memberikan keterangan atau bukti yang berkaitan dengan studi Peran Pendamping Lokal Desa dalam Pembangunan Desa. Dokumentasi sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dapat lebih dipertanggung jawabkan jika didukung dengan dokumen-dokumen agar analisis yang digunakan

tidak bersifat subyektif. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai macam dokumen seperti dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3**  
**Data Sekunder**

No	Jenis Data Sekunder	Data sekunder
1	Data online	Gambaran Umum Kabupaten Ponorogo Dalam Angka (PDA) Indeks Desa Membangun (IDM) Karangpatihan.com
2	Dokumen Desa	1. RKPDes Karangpatihan 2017 2. APBDes 2017 3. PAPBDes 2017 4. Gambaran Umum Desa 2016-2017 5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)2017
3	Dokumentasi	Foto-foto kegiatan penelitian yang diambil oleh peneliti

Sumber : Diolah oleh penulis, 2018

## 2. Sumber Data

Sumber data ialah subjek penelitian dimana dapat diperoleh data yang dibutuhkan Menurut Arikunto (2016:129) Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data memiliki pengaruh terhadap keakuratan data yang akan diperoleh dalam penelitian dilapangan, maka sumber data haruslah akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Berikut sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Informan adalah tempat peneliti bertanya guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, informan yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah pemerintah desa karangpatihan, masyarakat pelaku pembangunan, dan

pendamping lokal desa. Berikut daftar informan selama dilaksanakannya penelitian:

**Tabel 4**  
**Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan	Tanggal Wawancara
1	Eko Mulyadi	Kepala Desa Karangpatihan	11 Januari 2018 9 Februari 2018
2	Nur Cholis	Pendamping Lokal Desa	5 Januari 2018 11 Januari 2018 7 Februari 2018
3	Marni Wibowo	Sekertaris Desa/ Carik	5 Februari 2018 9 Februari 2018
4	Anton Kristiantoni	Tata Pemerintahan Kecamatan Balong	5 Januari 2018
5	Samuji	Ketua Rumah Harapan	11 Januari 2018
6	W. Muh Lamin	Ketua LPMD	11 Januari 2018
7	Mujianto	Ketua BPD	11 Januari 2018
8	Ambar	Staff Pemdes	9 Januari 2018 11 Januari 2018 5 Februari 2018
9	Teguh Cahyono	Ketua BUMDes	11 Januari 2018

Sumber : Diolah oleh penulis, 2018

2. Peristiwa adalah kajadian/kegiatan yang ada dilakukan oleh informan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Peristiwa dalam penelitian ini melihat peran apa saja yang dilakukan oleh pendamping lokal desa dalam pembangunan desa di Desa karangpatihan
3. Dokumen dapat berupa kertas, keterangan, arsip, pedoman dan sebagainya yang digunakan dalam mendukung data yang

dibutuhkan oleh peneliti. Daftar dokumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini seperti berikut ini:

- a) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) 2017.
- b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2017.
- c) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) 2017.
- d) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun anggaran 2017.
- e) Gambaran Umum Desa 2016-2017.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2016:305), “dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri”. Alat atau instrumen pendukung dalam penelitian ini yang digunakan adalah:

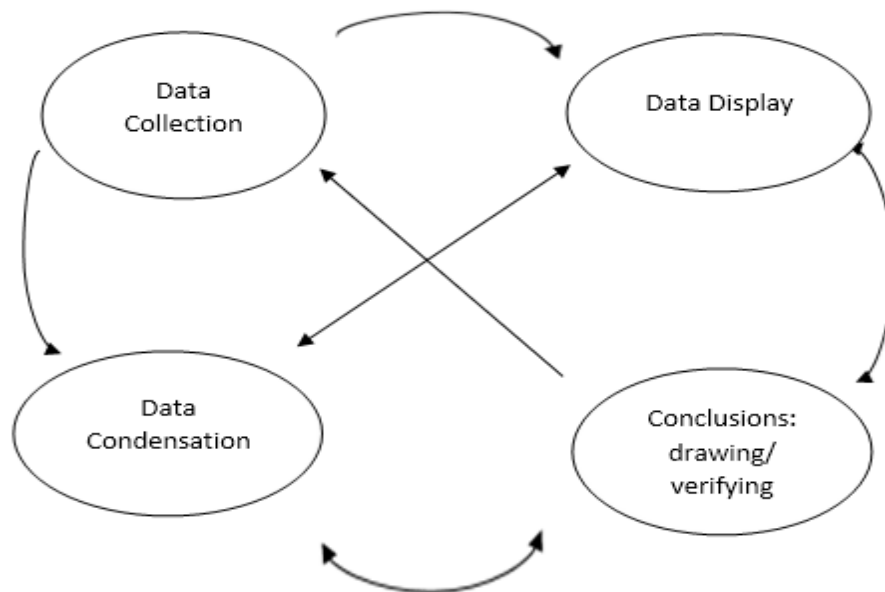
- a. Peneliti, dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri, yang diharapkan dapat melengkapi data yang telah ditemukan mulai observasi dan wawancara.
- b. Pedoman wawancara, merupakan seperangkat daftar pertanyaan yang diajukan langsung kepada pihak-pihak yang tertarik dengan penelitian. Pedoman wawancara ini merupakan sebuah instrumen penting yang berfungsi untuk memandu peneliti dalam mengumpulkan data selama penelitian, sehingga sesuai dengan fokus penelitian ini.

- c. Alat dokumentasi, selama di lapangan peneliti menggunakan catatan sebagai penunjang hasil pengamatan/observasi dokumentasi dan wawancara saat berlangsung. Tujuan agar peneliti agar mudah dalam menggali informasi dan meminimalisir kehilangan informasi saat penelitian berlangsung.

#### **F. Analisis Data**

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis dari Miles, Huberman, and Saldana dalam bukunya *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3<sup>rd</sup> ed). Alasan peneliti menggunakan analisis model ini karena peneliti melihat analisis Miles, Huberman, & Saldana lebih mudah dipahami dan sesuai dengan judul yang diambil. Analisis yang digunakan peneliti adalah analisis data interaktif dimana bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat. Dalam memahami metode analisa yang digunakan, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :





**Gambar 2. Model Analisis**

Sumber: Miles, Huberman, and Saldana *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3<sup>rd</sup> ed)

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bagaimana alur dari analisis data kualitatif, dapat dijelaskan sebagai berikut :

**1. Kondensasi data (*Data Condensation*)**

Data kondensasi mengacu pada proses pemilihan seleksi, fokus, menyederhanakan dan melakukan pergantian data yang diperoleh pada catatan, transkrip, wawancara, dokumen, data empiris ketika melaksanakan penelitian.

**2. Penyajian data (*Data Display*)**

Penyajian data dilakukan dengan tujuan agar penulis lebih mudah memahami permasalahan terkait penelitian, supaya dapat melakukan langkah selanjutnya. Pada umumnya penyajian merupakan suatu pengaturan, kumpulan informasi yang telah di kerucutkan sehingga dapat

ditarik kesimpulan. Penyajian data dapat dilakukan dengan bagan, uraian singkat, dan lain-lain.

**3. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verifying*)**

Setelah tahapan kondensasi dan penyajian data telah dilakukan, maka yang terakhir adalah tahapan mengambil kesimpulan. Pengambilan kesimpulan ialah proses menginterpretasikan data dari awal hingga akhir yang disertai pembuatan pola dan uraian/penjelasan





## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

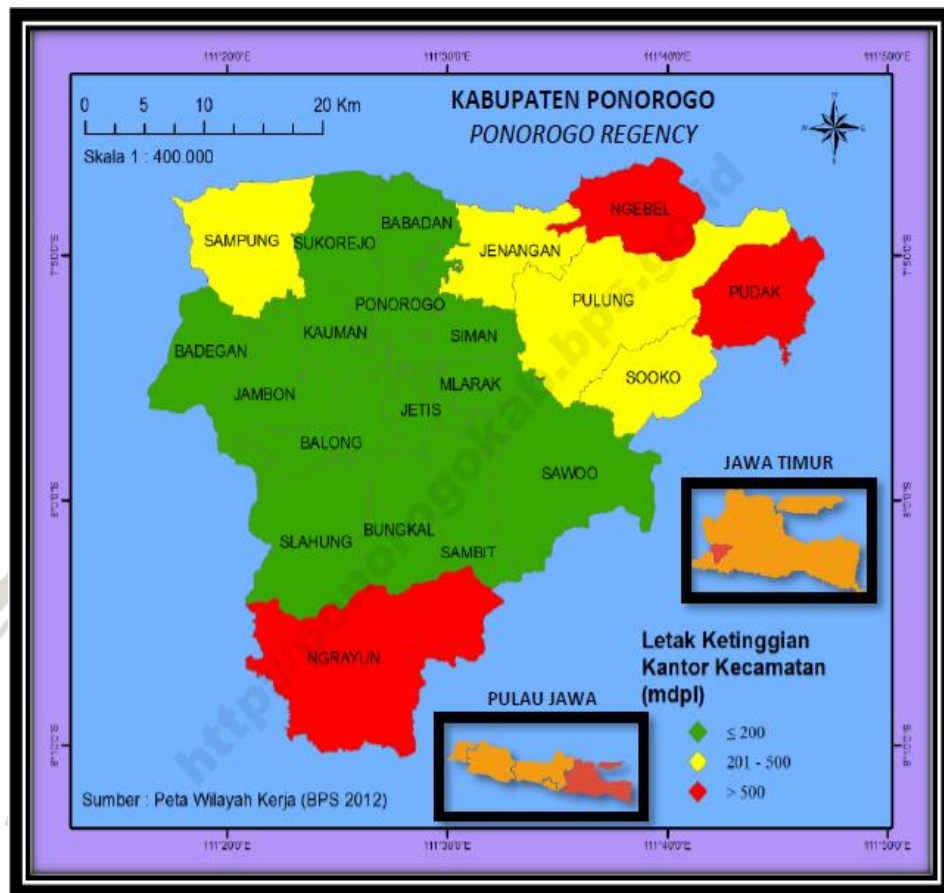
#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Ponorogo**

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 1.371.78 km<sup>2</sup>. Kondisi topografi Kabupaten Ponorogo berada pada ketinggian rata-rata kurang dari 500m diatas permukaan laut dengan suhu udara antara 18°-31°. Wilayah administrasi Kabupaten Ponorogo dikelilingi oleh pegunungan. Secara administratif batas-batas Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Magetan, Madiun, dan Nganjuk.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung.

Secara administrasi Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 kecamatan dan masing masing-masing kecamatan tersebar dengan ketinggian yang berbeda-beda. Berikut data terkait dengan pesebaran kecamatan di Kabupaten Ponorogo beserta ketinggian dari permukaan laut:



**Gambar 3. Peta Kabupaten Ponorogo Berdasarkan Wilayah Kecamatan**

Sumber: Ponorogo Dalam Angka 2016

**a. Keadaan Demografi**

Data kependudukan ialah salah satu data pokok yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan, karena penduduk merupakan subyek pembangunan sehingga dalam pelaksanaan pembangunan perlu diperhatikan dengan teliti terkait sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan. Saat ini tercatat jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2015 sejumlah 867.393 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 632 jiwa/km<sup>2</sup>. Tercatat rasio jenis kelamin sebesar 99,91 yang



dapat diartikan bahwa setiap 1.000 penduduk perempuan terdapat sekitar 999 penduduk laki-laki.

Jumlah pencari kerja pada tahun 2015 tercatat 6.704 orang yang terdiri dari 2.355 laki-laki dan 4.349 perempuan. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2015 berada dalam angka 3,68%. Upah Minimum Kerja (UMK) pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.322.500,-.

#### **b. Kondisi Sosial dan Ekonomi**

Kondisi sosial masyarakat Kabupaten Ponorogo adalah masyarakat mataraman yang masih memegang adat istiadat yang diwariskan nenek moyangnya. Salah satu warisan tersebut terlihat dalam ragam hasil pertanian di Kabupaten Ponorogo. Kondisi sosial inilah yang mendorong masyarakat untuk menggerakkan perekonomian melalui sektor pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian Kabupaten Ponorogo sangat beragam mulai dari padi, jagung, kedelai, porang dll. Berikut data hasil pertanian dan perkebunan di Kabupaten Ponorogo:

**Tabel 5**  
**Komoditi Hasil Bumi Kabupaten Ponorogo**

No	Komoditi	Keterangan
1	Padi	Produksi padi 3.266.681 Ku/Tahun Luas Areal Tanam 64.671 Ha Produktivitas saat ini mencapai 50,83 Ku/Ha Potensi di Kecamatan Pulung, Balong, Kauman, Sukorejo, Babadan, Jenangan
2	Jagung	Luas panen 34.307 Ha Produksi 1.760.592 Ku Produktivitas 51,32 Ku/Ha

		Potensi Kecamatan Sambit, Sawoo, Pulung, Jambon, Badegan, Sampung
3	Ubi Kayu	Luas panen 24.218 Ha Produksi 5.645.945 Ku Produktivitas 233,13 Ku/Ha Potensi Kecamatan Ngrayun, Sawoo
4	Kedelai	Luas panen 20.567 Ha Produksi 309.536 Ku Produktivitas 15,05 Ku/Ha Potensi Kecamatan Sukorejo, Pulung, Sawoo
5	Kakao	Luas lahan 539,98 Ha Produksi 390,45 Ton Potensi Kecamatan Pulung, Babadan, Ngebel
6	Kelapa	Luas Paneh 922 Ha Produksi 2.999,33 Ton Potensi Kecamatan Pulung, Ngrayun, Sooko
7	Cengkeh	Luas Paneh 1.504,33Ha Produksi 236,03 Ton Potensi Kecamatan Ngebel, Ngrayun, Pulung

Sumber: Ponorogo dalam angka 2016

### c. Pemerintahan Kabupaten Ponorogo

Ponorogo ialah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, maka Kabupaten Ponorogo dipimpin oleh seorang bupati yang dipilih oleh secara langsung melalui proses Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Saat ini jumlah kecamatan di Kabupaten Ponorogo berjumlah 21 kecamatan dan akan mengalami penambahan beberapa kecamatan kerana ada wacana dari pemerintah daerah akan yang menambah kecamatan guna mempercepat pembangunan di wilayah Ponorogo. Pada tahun 2015 jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo sejumlah 11.980, jumlah tersebut mengalami peningkatan dari jumlah ASN yang berada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Ponorogo pada

beberapa tahun sebelumnya. Berdasarkan jenis kelamin, perbandingan ASN pegawai laki-laki dan perempuan hampir sama banyaknya. Berikut data ASN di Kabupaten Ponorogo:

Golongan Kepangkatan <i>Hierarchy</i>		Jenis Kelamin <i>Sex</i>		Jumlah <i>Total</i>
		Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	I / A	4	-	4
2.	I / B	38	2	40
3.	I / C	126	5	131
4.	I / D	52	1	53
5.	II / A	344	48	392
6.	II / B	434	166	600
7.	II / C	667	581	1 248
8.	II / D	198	283	481
9.	III / A	356	448	804
10.	III / B	740	684	1 424
11.	III / C	540	533	1 073
12.	III / D	553	471	1 024
13.	IV / A	839	615	1 454
14.	IV / B	1 458	1 511	2 969
15.	IV / C	157	120	277
16.	IV / D	4	2	6
Kabupaten Ponorogo		6 510	5 470	11 980

**Gambar 4. Data Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Ponorogo.**

Sumber: ponorogokab.bps.go.id

Visi Kabupaten Ponorogo adalah Ponorogo Berbenah Menuju Ponorogo Yang Lebih Maju, berbudaya dan Religius.

Sedang misi Kabupaten Ponorogo ialah:

1. Terbentuknya budaya keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah, tanggap dan berkemampuan andal memecahkan masalah rakyat.

2. Terkelolanya seluruh sumber daya daerah menjadi lebih berdayaguna, unggul, produktif, berkelanjutan, serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial.
3. Terwujudnya pengelolaan infrastruktur strategis secara profesional, agar memiliki daya dukung yang kokoh untuk menyokong produktivitas masyarakat, kemajuan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan umum.
4. Terbangunnya petanian modern, sebagai basis pengembangan model ekonomi kerakyatan yang berdaya saing tangguh, memicu investasi dan industri, serta berperan menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah.
5. Penataan kawasan yang nyaman untuk semua, dengan ketersediaan ruang publik yang memadai, bewawasan kelestarian lingkungan, sekaligus upaya mempercepat pengurangan ketimpangan antara wilayah perdesaan dan perkotaan.
6. Terbangunnya prinsip kemandirian dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin, pengangguran, serta perluasan kesempatan kerja.
7. Meningkatkan peran aktif pemerintah daerah dalam memajukan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, guna mendorong kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang hebat dan bertaqwa.

## 1. Gambaran Umum Desa Karangpatihan

### a. Keadaan Demografi

Penduduk Desa Karangpatihan tercatat pada tahun 2017 berjumlah 5.794 jiwa yang terdiri dari 2.860 laki-laki dan 2.932 perempuan, berikut data selengkapnya:

**Tabel 6**  
**Data Penduduk Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong Tahun 2017**

No.	Nama Dusun	Jumlah Penduduk		Jenis Kelamin	
		Jiwa	KK	Laki-Laki	Perempuan
1	Bendo	1165	304	576	589
2	Bibis	566	234	262	304
3	Krajan	1283	435	635	648
4	Tanggungrejo	2780	897	1447	1333
	<b>Jumlah</b>	<b>5.794</b>	<b>1.870</b>	<b>2.860</b>	<b>2.932</b>
	<b>% thd jml pdana desak total</b>			<b>49,36%</b>	<b>50,60%</b>

Sumber : Profil Desa Karangpatihan Tahun 2017

### b. Kondisi sosial ekonomi

Kondisi masyarakat Desa Karangpatihan ialah sebagai masyarakat gotong-royong, melestarikan budaya leluhur seperti hajat bumi dan juga bersih desa. Toleransi kepada antara umat beragama dan budaya bermasyarakat. Hal menjadi menunjang pengembangan tingkat keswadayaan masyarakat baik dalam bentuk materi, sumbangan pemikiran maupun tenaga sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya alam yang ada, untuk pembangunan desa. Gotong-royong seluruh masyarakat akan



mendukung dalam pengoptimalkan pembangunan desa demi kemajuan bersama.

Kondisi perekonomian masyarakat Desa Karangpatihan diantaranya industri rumah tangga yang meliputi jajanan pasarrangginang, kripik tempe, dan tempe, sektor agrobisnis meliputi pertanian (padi), perkebunan (singkong, mangga, jeruk, kacang, melon, jagung), dan sektor kehutanan yang meliputi komoditi kayu jati, sektor peternakan meliputi peternakan kambing, sapi, bebek, ayam, dan itik, sektor perikanan meliputi ikan lele.

**Tabel 7**  
**Data Monografi Sumberdaya Ekonomi**  
**Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong Tahun 2016**

No.	Nama Dusun	Tenaga Kerja yang Terserap (orang)				
		Industri Rumah Tangga	AgroBisnis	Perdagangan	Jasa	Wisata
1	Bendo	13	48	4	402	
2	Bibis	7	70	18	200	
3	Krajan	18	2	6	532	
4	Tanggungrejo	26	406	24	998	63
	<b>Jumlah</b>	<b>64</b>	<b>526</b>	<b>52</b>	<b>2132</b>	

Sumber : Hasil Pendataan dan Transek Tahun 2016

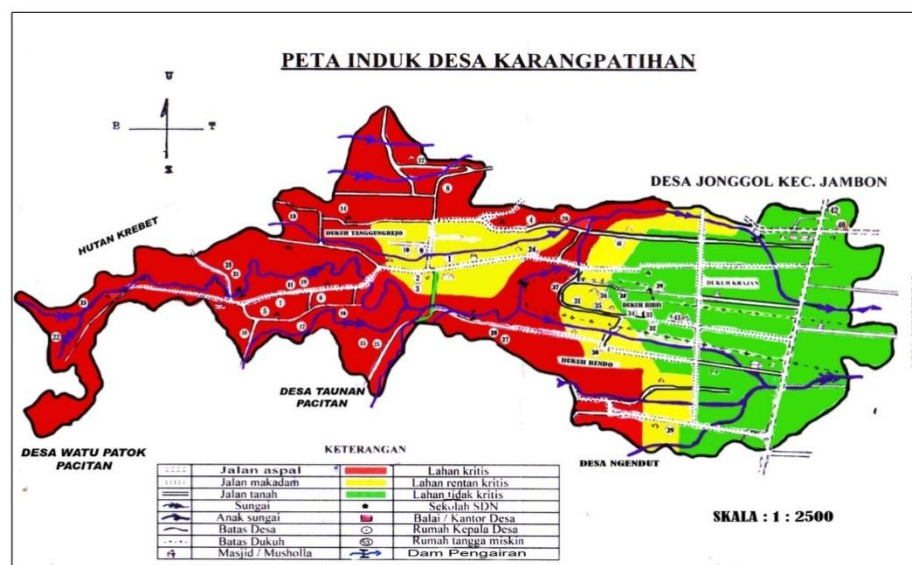
### c. Pemerintahan Desa Karangpatihan

Desa Karangpatihan merupakan desa yang memiliki wilayah paling luas di Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Luas wilayah yang dimiliki oleh Desa Karangpatihan ialah  $\pm 1.336,6$  Ha, dan ketinggian wilayah

sekitar 7 mdpl di daerah rendah dan 153,3 mdpl (meter diatas permukaan laut).

Secara administratif Desa Karangpatihan memiliki batas wilayah sebagai berikut:

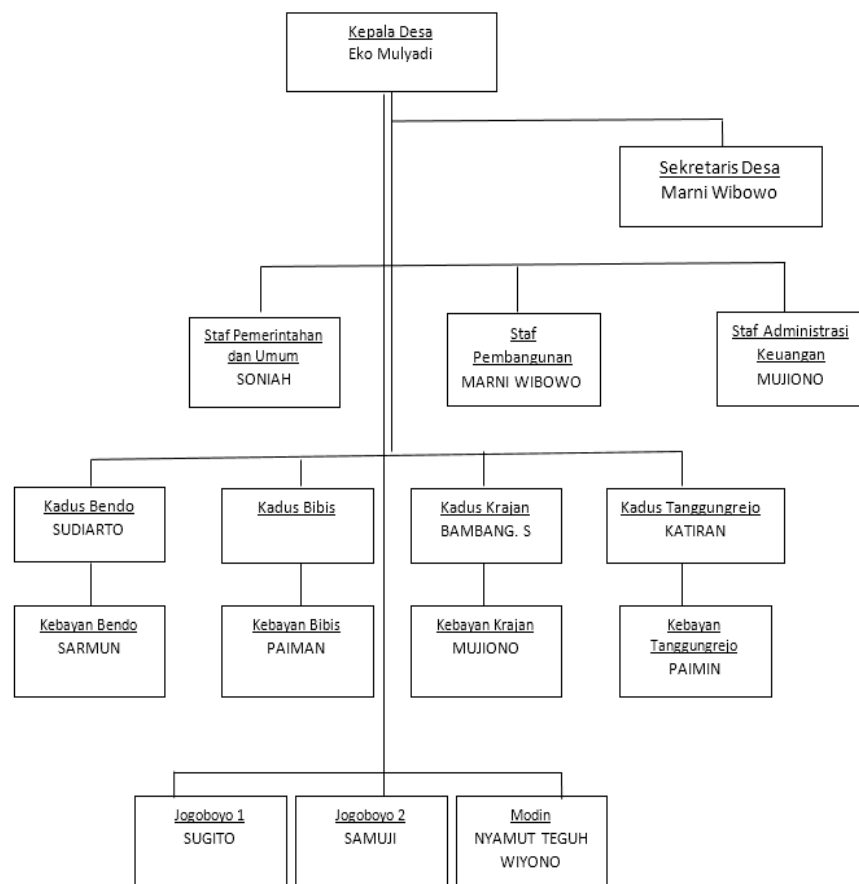
1. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Desa Jonggol Kecamatan Jambon
2. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Desa Ngendut Kecamatan Balong
3. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Hutan Negara/Kabupaten Pacitan
4. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Desa Sumberejo Kecamatan Balong



**Gambar 5. Peta desa Karangpatihan**  
Sumber : Profil Desa Karangpatihan 2017

Desa Karangpatihan saat ini dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Eko Mulyadi, beliau terpilih menjadi kepala desa melalui pemilihan langsung yang dipilih oleh masyarakat desa. Dalam menjalankan

pemerintahan desa, kepala desa di bantu oleh sekretaris desa atau biasa disebut carik desa dan para jajaran aparatur desa. Berikut susunan pengurus Desa Karangpatihan:



**Gambar 6. Struktur Organisasi**

Sumber: Profil Desa Karangpatihan

Dalam pembangunan desa, pemerintahan Desa Karangpatihan salah satunya berpedoman pada visi misi. Visi Desa Karangpatihan adalah Terwujudnya masyarakat desa yang sejahtera dan dinamis dalam nuansa religius dan berwawasan lingkungan sebagai desa pendidikan dan wisata. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan melalui misi Desa Karangpatihan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Menciptakan hubungan Komunikasi yang baik dengan semua unsur lembaga Desa;
3. Menciptakan Jalinan Koordinasi dan Kerjasama yang baik diantara semua unsur lembaga Desa;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan;
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produksi pertanian sebagai basis perekonomian masyarakat;
6. Meningkatkan Sumber Daya Manusia ( SDM );
7. Meningkatkan sarana pelayanan kesehatan;
8. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur Desa.

#### **d. Keadaan Infrastruktur dan Utilitas**

##### **1. Jaringan Jalan**

Jalan memiliki peran penting dalam pembangunan wilayah desa yang menopang berbagai aktivitas yang menentukan tingkat perkembangan wilayah desa terkait dengan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya. Jaringan jalan berfungsi untuk menunjang berbagai aktivitas masyarakat desa dalam kehidupan dan penghidupan baik dalam lingkungan desa maupun akses untuk menuju desa lainnya.

**Tabel 8**  
**Data Kondisi Jalan Desa Karangpatihan,**  
**Kecamatan Balong Tahun 2016**

No	Lokasi Dusun	Panjang Jalan (m)	Lebar Jalan (m)	Kondisi Jalan		Tingkat Aksesibilitas
				<b>Fungsi Jalan</b>	<b>Jenis Perkerasan</b>	

1	Bendo	7.500	4-6	Jalan dusun- desa	Tanah-aspal	Sepi-ramai
2	Bibis	5.000	6	Jalan dusun- jalan desa	Tanah-aspal	Sepi-ramai
3	Krajan	11.000	6	Jalan dusun- jalan desa	Tanah-aspal	Sepi-ramai
4	Tanggungrej o	16.000	6	Jalan dusun- desa	Tanah-aspal	Sepi-ramai
Total panjang jalan		39.500				

Sumber : Hasil Pendataan dan Transek Tahun 2016

### 1. Jaringan Drainase

Fungsi drainase pada wilayah perdesaan sebagai usaha mengalirkan air hujan agar wilayah tersebut tidak tergenang, drainase juga digunakan untuk mengalirkan aliran air hujan di permukaan jalan agar jalan tidak cepat rusak. Keberadaan drainase sangat penting sebagai keamanan lingkungan sekitar tempat tinggal masyarakat supaya terhindar dari bahaya banjir.

**Tabel 9**  
**Data Kondisi Drainase Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong**  
**Tahun 2016**

No.	Lokasi	Panjang	Lebar	Kualitas Drainase	
	Dusun	Drainase (m)	Drainase (m)	Kelas Drainase	Jenis Konstruksi
1	Bendo	7500	0,5 – 1	Sekunder- Tersier	Batu-semen- pasir
2	Bibis	5000	0,5 – 1	Sekunder- Tersier	Batu-semen- pasir



3	Krajan	11000	0,5 – 1	Sekunder-Tersier	Batu-semen-pasir
4	Tanggungrej o	16000	0,5 – 1	Sekunder-Tersier	Batu-semen-pasir
Total panjang drainase		39500			

Sumber: Hasil Pendataan dan Transek Tahun 2016

## 2. Jaringan Air Bersih

Air merupakan kebutuhan yang mutlak bagi kehidupan dan penghidupan manusia sehari-hari yang digunakan untuk minum, mencuci, mandi, dsb. Pemenuhan kebutuhan air bersih dan air minum bagi masyarakat Desa Karangpatihan diperoleh dari sumber air bersih yang ada seperti sumur bor, mata air, sumur tradisional.

**Tabel 10**  
**Data Kondisi Pengguna Sumber Air Bersih Desa Karangpatihan**  
**Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo Tahun 2016**

NO	Sumber Air Bersih	Bendo	Bibis	Krajan	Tanggungrejo
1	Sumur bor (org)	115	40	100	7
2	Mata air (org)	1	-	-	2
3	Sumur tradisional (org)	73	98	87	185

Sumber : Hasil Pendataan dan Transek Tahun 2016

## 3. Kondisi Sumber Daya Alam

Potensi alam yang di miliki oleh Desa Karangpatihan cukup bervariasi yang meliputi Bahan galian (batu) Mata air (mata air, sumur, dan air gunung) hasil bumi (mangga, jagung, padi, jeruk, kayu jati, kacang,

melon dll) wisata alam (hutan pinus dan curug). Terkecuali wisata alam ketiga potensi sumber daya alam lainnya langsung dikelola oleh masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 12.

**Tabel 11**  
**Data Monografi Sumberdaya Alam**  
**Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong Tahun 2016**

No.	Nama Dusun	Jenis Sumber Daya Alam			
		Bahan Galian	Mata Air	Hasil Bumi	Wisata Alam
1	Bendo		Mata Air	Mangga	Wisata Beji
			Sumur	Jeruk	
				Jagung	
				Kacang	
				Padi	
				Singkong	
2	Bibis		Sumur	Mangga	
				Jeruk	
				Melon	
				Padi	
				Kacang	
				Kakao	
				Pisang	
				Cabai	
				Singkong	
3	Krajan		Sumur	Padi	
				Mangga	
				Kacang	
				Jagung	
				Singkong	
4	Tanggungrejo	Batu	Sumur	Jeruk	Hutan Pinus

			Kali	Mangga	Air terjun
			Air gunung	Sayuran	
				Kacang	
				Pisang	
				Padi	
				Jagung	
				Singkong	

Sumber : Hasil Pendataan dan Transek Tahun 2016

#### 4. Fasilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hak dan kebutuhan tiap warga negara, untuk menunjang kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan telah berdiri beberapa tempat untuk menuntut ilmu di Desa Karangpatihan, berikut data selengkapnya fasilitas pendidikan:

**Tabel 12**  
**Tabel Fasilitas Pendidikan**

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	5
2	Sekolah Dasar Negeri dan Swasta	4
3	TPA/TPQ	6

Sumber: Profil Desa Karangpatihan 2017

## **B. Penyajian Hasil Data Fokus Penelitian**

### **1. Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam pembangunan Desa Karangpatihan**

#### **a. Peran Fasilitasi dan Edukasi Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan**

Peran fasilitasi dan edukasi PLD dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan ditunjukkan melalui adanya kegiatan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam penyusunan dokumen tersebut pendamping lokal desa memiliki peran fasilitasi dan edukasi sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa agar mendampingi desa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa Karangpatihan terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, PLD sudah melaksanakan pendampingan terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut.

“....Pak Cholis sebagai PLD di Desa Karangpatihan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya salah satunya dalam penyusunan dokumen perencanaan RKPDDes dan APBDes boleh dikatakan sangat baik. Kalau saya ukur dengan prosentase Pak Cholis ini kinerjanya lebih dari 70%. Beliau juga memahami tugas dan fungsinya, ketika dalam musyawarah dana desa tidak digunakan sesuai aturan dari pemerintah, maka biasanya Pak Cholis menyarankan kepada saya utamanya untuk tidak dimasukkan dalam hasil rapat namun dimasukkan dalam rencana pembangunan yang bersumber

pada anggaran lain selain dana desa. PLD dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan benar-benar proaktif, itu bisa kita dilihat dari musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat dusun Pak Cholis sudah hadir di sana. Namun biasanya sebelum diselenggarakan musrenbang tingkat dusun Pak Cholis ini sudah turun bersama BPD untuk sosialisasi dan penggalan data terkait potensi yang ada di tingkat RT” (wawancara dengan Bapak Eko Mulyadi selaku Kepala Desa Karangpatihan pada 11 januari)

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Eko Mulyadi tersebut diketahui bahwa peran pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dilakukan oleh PLD dengan mengetahui apa yang menjadi tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan pendampingan PLD berupaya menempatkan diri untuk tidak terlalu menginterfensi masyarakat dan pemerintah desa dalam memprioritaskan pembangunan. Namun ketika ada hal-hal yang belum jelas dalam pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa, maka PLD memberikan pemahaman kepada kepala desa terkait aturan-aturan dalam menggunakan dana desa. Apabila penggunaan dana desa tidak sesuai dengan peraturan yang saat ini berlaku, maka usulan prioritas pembangunan tidak bisa masuk pada rekening pencairan dana desa. PLD dalam pendampingan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan juga terlibat secara langsung melalui penggalan data pada tingkat paling bawah.





**Gambar 8. Pertemuan Rutin Masyarakat dan Penggalian Data**

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2018

Kegiatan pertemuan rutin yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai salah satu cara berkoordinasi dalam melaksanakan pembangunan. Berkumpulnya masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu dapat digunakan PLD guna menggali informasi yang dapat digunakan sebagai modal pembangunan desa. Penggalian informasi tersebut dapat dilakukan bersama-sama BPD maupun bersama kader pemberdayaan. Kegiatan penggalian data ini dapat menjadi salah satu ukuran prioritas pembangunan yang perlu di angkat oleh pemerintah desa dalam membangun desa guna mensejahterakan masyarakatnya

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bapak Mujianto, bahwa PLD di Desa Karangpatihan sangat membantu pemerintah desa dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa, berikut hasil wawancaranya.

“.....saya kira PLD di sini benar-benar pro aktif, dia saja membawahi 5 desa, namun tiap desa membutuhkan pasti PLD datang walaupun cuma sebentar karena seringkali acaranya di 5 desa yang dibawah hampir bersamaan. Bukan hanya itu saja, Mas Cholis kalau koordinasi dengan pihak pendamping diatasnya sangat cepat sehingga musyawarah tidak perlu menunggu lama. Waktu musyawarah penyusunan RKPDes-RAPBDes

sampai jadi APBDes Mas Cholis ikut mengarahkan agar pembangunan di prioritaskan pada kebutuhan yang lebih mendesak. Semua keputusan disini selalu dilakukan dengan bermusyawarah, jadi kalau musyawarahnya ada kaitanya dengan dana desa, maka kami juga mengundang Mas Cholis” (wawancara dengan Bapak Mujianto selaku Ketua BPD Karangpatihan pada 11 Januari)

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Mujianto diketahui bahwa PLD dalam melaksanakan pendampingan dalam pembangunan desa dinilai proaktif dalam membantu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. PLD berkontribusi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan mulai dari tingkat paling bawah hingga tahap musyawarah perencanaan pembangunan desa. Keterlibatan dan pendampingan yang dilakukan oleh PLD dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan diharapkan agar dokumen yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas akan memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Melalui dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas, maka pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat desa. PLD yang aktif dan aspiratif dalam melaksanakan pendampingan, maka seluruh usulan yang diberikan masyarakat desa menjadi tersalurkan. Inilah salah satu pemberdayaan yang dilakukan oleh PLD agar masyarakat desa menjadi subjek pembangunan. Dapat dilihat pada hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat Bapak Samuji selaku Ketua Rumah Harapan Karangpatihan, bahwa pendamping lokal desa berperan aktif dan memahami tugas yang dimiliki sebagai pendamping desa.

“.....Peran PLD sangat dibutuhkan oleh masyarakat Karangpatihan, saya rasa banyak masyarakat disini belum memahami potensi apa yang mau di angkat dalam merumuskan perencanaan pembangunan dan banyak juga masyarakat yang tidak dapat membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan.” (wawancara dengan Bapak Samuji selaku Ketua Rumah Harapan Karangpatihan pada 11 Januari)

Hasil wawancara dengan Bapak Samuji dapat disimpulkan bahwa PLD dalam mendampingi desa telah memberikan kemudahan dalam menentukan usulan prioritas pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, sehingga perencanaan yang dihasilkan tidak terkesan untuk memenuhi syarat secara administratif.

Ditemui ditempat yang sama bahwa PLD dalam melaksanakan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berperan mulai awal kegiatan hingga dokumen tersebut disahkan oleh kepala desa. Berikut dapat disimak hasil wawancara peneliti dengan Bapak Cholis selaku PLD Karangpatihan.

“.....saya terlibat mulai dari tahap penggalan potensi hingga tahap musyawarahnya. Peran saya dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan itu memberikan pengetahuan kepada masyarakat. yang sering saya mengingatkan kepada masyarakat agar usulan pembangunan yang diberikan memberikan manfaat untuk kehidupan mereka. Saya kan juga menggali potensi melalui kader pemberdayaan, biasanya itu jadi pedoman saya bahwa nanti yang diusulkan masyarakat juga tidak jauh dari itu. (Wawancara dengan Bapak Nur Cholis selaku Pendamping Lokal Desa Karangpatihan pada 11 Januari)

Hasil wawancara dengan Bapak Cholis menunjukkan bahwa peran pendamping lokal desa ialah memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar dalam menentukan usulan prioritas pembangunan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan masyarakat desa.



**Gambar 9. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) 2017**

Sumber: Desa Karangpatihan 2018

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan berbagai sumber, peneliti menyimpulkan bahwa peran PLD dalam melaksanakan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa sangat membantu pemerintah desa. Hal tersebut tercermin dalam kegiatan penggalan potensi hingga tahap musrenbang desa. PLD dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berkontribusi untuk memberikan arahan agar perencanaan pembangunan yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik hingga menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan. Peran yang dilakukan oleh PLD dalam pembangunan Desa Karangpatihan terlaksana hingga menghasilkan produk berupa dokumen perencanaan pembangunan tingkat desa yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) tahun 2017.

#### **b. Peran Teknis Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur saat ini menjadi prioritas Presiden Joko Widodo, hal tersebut juga berdampak pada kebijakan pembangunan di Desa



Karangpatihan. Peran teknis PLD dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilakukan bersama *stakeholder* yang ada di desa. Mendampingi desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu tugas dan peran PLD sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa agar mendampingi desa dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa. Keterlibatan PLD dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dapat di simak dari wawancara berikut.

“.....peran PLD dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang pasti itu RAB kita kasihkan ke Mas Cholis, nanti beliau yang mencairkan uangnya sama pendamping diatasnya. Mas Cholis kalau lagi nggak repot biasanya ikut serta mengkoordinasi pekerja yang dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan, setelah itu biasanya saya minta tolong ke PLD untuk mengawasi dengan saya dalam pembelian bahan-bahan yang digunakan dana pelaporannya, soalnya harga satuan kabupaten lebih mudahnya saya koordinasikan dengan PLD” (wawancara dengan Kepala Desa Karangpatihan Bapak Eko Mulyadi pada 11 Januari)

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Eko Mulyadi dapat diketahui bahwa peran PLD mengkoordinasi pekerja yang harus berasal dari masyarakat desa setempat sebagai salah satu upaya pemberdayaan yang nantinya memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar menjadi subyek pembangunan. PLD juga melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa yang merupakan tugas dan perannya sebagai seorang pendamping. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah desa melalui tahapan perencanaan hingga tahap pelaporan. Peran pendamping lokal desa dalam pelaksanaan pembangunan



desa juga meliputi tahap perencanaan hingga tahap pelaporan. Berikut hasil wawancara bersama Ketua LPMD Desa Karangpatihan:

“.....pelaksanaan pembangunan infrastruktur PLD tidak jarang meninjau ditempat kegiatan serta mengajak pendamping teknis tingkat kecamatan. Biasanya saya mendapat arahan dan masukan agar dalam pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan memiliki kualitas yang baik” (wawancara dengan Ketua LPMD Desa Karangpatihan Bapak W. Muh Lamin pada 11 Januari).

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Lamin, dapat dilihat bahwa koordinasi yang dilakukan PLD ialah sebagai upaya agar hasil pembangunan diperoleh secara optimal. Dengan optimalnya hasil pembangunan infrastruktur di Desa Karangpatihan, diharapkan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama dan mepercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat desa.

**Gambar 10. Realisasi Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2017**  
Sumber: Desa Karangpatihan 2018

Tahapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur diawali pada tahap perencanaan. Tahap perencanaan pembangunan infrastruktur pemerintah desa membutuhkan tenaga ahli yang mampu membuat gambar bangunan. Terlihat di dalam laporan realisasi anggaran pada tahun 2017 bahwa

Pemerintah Desa Karangpatihan mengeluarkan biaya guna membayar jasa untuk membuat gambar bangunan. Tenaga ahli gambar bangunan dilibatkan agar pembangunan yang dilaksanakan terencana dan memiliki kualitas yang baik. Berikut hasil wawancara peneliti dengan pendamping lokal desa Desa Karangpatihan.

“.....seringkali dalam perencanaan bagian teknisnya diberikan kepada orang kepercayaan kepala desa. Namun saya juga tidak jarang juga dimintai tolong untuk menggambar bangunan yang sudah masuk pada RKPDes. Tapi biasanya saya minta tolong pada tenaga pendamping teknis untuk mengerjakannya dan tenaga pendamping teknis yang memberikan hasilnya kepada pak kades. Jadi kalau pelaksanaan pembangunan saya datang dengan pendamping teknis dari kecamatan untuk memonitoring sejauh mana pelaksanaan pembangunan infrastrukturnya. Masalah pencairan biasanya saya juga minta tolong ke pendamping diatas saya agar mempermudah pencairan dana desa”(wawancara dengan Bapak Nur Cholis Selaku PLD Desa Karangpatihan pada 11 Januari).

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Cholis dapat dilihat bahwa PLD juga melibatkan pendamping teknis yang berkedudukan di kecamatan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur desa. Keterlibatan pendamping teknis yang ada di kecamatan dalam rangka upaya PLD untuk melibatkan seluruh *stakeholder* agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan hasil yang memuaskan. Monitoring yang dilakukan PLD dengan pendamping diatasnya merupakan wujud dari komitmen menjalankan pembangunan secara kolaborasi. Pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara individu karena menyangkut banyak kepentingan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dari tiga narasumber dan dokumen yang diperoleh, peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran PLD dalam

pelaksanaan pembangunan infrastruktur ialah aktif. Peran aktif tersebut dapat dilihat melalui peran PLD dari tahap pembuatan rencana anggaran biaya, gambar, pelaksanaan pembangunan melalui pengawasan dll hingga tahap laporan. Peran aktif PLD tersebut sangatlah berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur sehingga beban dan fokus pembangunan di Desa Karangpatihan dapat dikurangi dan dapat digunakan untuk merencanakan pembangunan pada sektor prioritas lainnya. Dari tahap penyusunan RAB hingga monitoring PLD terlibat pembangunan secara langsung dan aktif. PLD juga melibatkan seluruh *stake holder* sehingga pembangunan yang dilaksanakan di Desa Karangpatihan tidak mengalami kendala yang berarti sehingga hasil pembangunan dapat segera dinikmati oleh masyarakat desa. Pembangunan infrastruktur desa memberikan kemudahan dan keamanan masyarakat dalam mempercepat perekonomian yang ada di desa. Hasil bumi yang dimiliki oleh masyarakat dapat segera di jual ke pasar yang ada di kota ataupun di Kecamatan Balong. Melalui pembangunan infrastruktur perekonomian di desa akan lebih maju karena akses menuju tempat jual beli lebih mudah dan aman. Baiknya infrastruktur yang dimiliki Desa Karangpatihan juga mendorong masyarakat lain dari luar desa untuk berkunjung ke wisata-wisata yang dimiliki oleh Desa Karangpatihan. Semakin banyaknya masyarakat yang berkunjung ke Wisata yang ada di Desa Karangpatihan maka dapat memacu pertumbuhan ekonomi di masyarakat.

### c. Peran Perwakilan Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan

Kesehatan merupakan hak setiap warga negara, ketika banyak warga suatu negara mengalami gangguan kesehatan maka tidak ada harapan yang besar bahwa penduduknya dapat menjadi subyek pembangunan yang berkontribusi penuh dalam melaksanakan pembangunan suatu negara. Hal inilah yang melatarbelakangi banyaknya program kesehatan dari pemerintah Desa Karangpatihan Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Karangpatihan meliputi Posyandu balita dan lansia, Karangpatihan Peduli, Mobil Desa Siaga, Peduli Balita Miskin, lapangan futsal dan lapangan bulutangkis. Peran PLD dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan hanya terlibat dalam kegiatan yang menggunakan anggaran yang bersumber pada dana desa, sedang kegiatan yang dibiayai oleh dana desa meliputi posyandu dan pembangunan sarana olahraga. Menurut cuplikan hasil wawancara dengan Bapak Eko Mulyadi selaku Kepala Desa Karangpatihan bahwa PLD tetap memiliki tugas dalam pembangunan kesehatan di Desa Karangpatih, hasil wawancaranya dapat dilihat sebagai berikut.

“.....peran perwakilan PLD tidak terlalu terlihat pada bidang kesehatan, karena banyak program kesehatan dibawah kementrian kesehatan dan kebanyakan juga program kesehatan juga dibiayai oleh swadaya masyarakat. PLD tetap memiliki tugas yaitu mendampingi Posyandu dan pembangunan sarana kesehatan, saat ini saya berupaya pembangunan sarana olahraga bisa selesai tahun 2019, itu selalu saya konsultasikan juga sama Mas Cholis, karena saya tidak mungkin mengandalkan percepatan pembangunan sarana olahraga hanya bersumber dari dana desa saja. Saya juga minta tolong kepada Mas Cholis dan teman-teman yang lain agar mencari sumber pembiayaan siapa tahu mereka informasi ada hibah,

CSR dll”(wawancara dengan Bapak Eko Mulyadi Selaku Kepala Desa Karangpatihan pada 11 Januari).

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Eko Mulyadi dapat diketahui bahwa Peran perwakilan PLD dalam pembangunan kesehatan di Desa Karangpatihan terfokus pada pembiayaan yang bersumber dari dana desa. Melalui peran perwakilan PLD dapat memberikan alternatif pembiayaan selain dana desa terkait dengan percepatan pembangunan sarana kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Tugas dan peran perwakilan pendamping lokal desa tidak terbatas hanya pada sarana kesehatan dan olahraga. Posyandu yang dimiliki pemerintah merupakan salah satu tugas PLD untuk mendampingi pemerintah desa dalam upaya memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.



**Gambar 11. Informasi Pelayanan Kesehatan Melalui Posyandu**

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2018

Pelaksanaan pembangunan kesehatan di Desa Karangpatihan merupakan salah satu upaya pemerintah desa memberikan pelayanan sosial kepada masyarakatnya. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar hidup sehat merupakan tindak lanjut Posyandu di Desa Karangpatihan. Peran perwakilan PLD dalam pembangunan kesehatan di bantu oleh kader pemberdayaan. Upaya jangka panjang yang dilakukan Pemerintah Desa



Karangpatihan agar masyarakatnya dapat menjaga kesehatan dan kebugaran tubuhnya, maka akan dibangun sarana dan prasarana olahraga.

Percepatan pembangunan sarana kesehatan dan olahraga di Desa Karangpatihan mendapat persetujuan dan perhatian yang luar biasa dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Cuplikan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mujianto bahwa sudah lama masyarakat desa menginginkan tempat olahraga yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Berikut hasil wawancaranya.

“.....percepatan pembangunan sarana kesehatan dan olahraga di desa kami disambut gembira oleh semua masyarakat. Saya kira percepatan pembangunan tersebut benar-benar menghabiskan tenaga dari semua pihak, utamanya PLD, karena PLD dimintai tolong untuk usaha mencari sumber pembiayaan lain selain dana desa” (wawancara Dengan Bapak Mujianto Ketua BPD pada 11 Januari).

Hasil wawancara dengan Bapak Mujianto, ia menyambut baik percepatan pembangunan sarana kesehatan dan olahraga yang sumber pembiayaannya juga dicarikan oleh PLD. Peran perwakilan yang dilakukan oleh PLD diharapkan dapat membantu Desa Karangpatihan untuk segera mewujudkan sarana olah raga.

Kebijakan yang diambil pemerintah desa untuk mempercepat pembangunan sarana olahraga merupakan langkah yang konkrit dari kebutuhan masyarakat desa dan salah satu program prioritas Kementerian Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2017. Upaya tersebut juga menjadi tantangan tersendiri bagi PLD yang bertugas untuk ikut berkontribusi membantu pemerintah Desa Karangpatihan

mewujudkannya. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Cholis selaku pendamping lokal Desa Karangpatihan.

“.....setiap pembangunan yang ada di desa, pasti saya respon dengan baik, mbah lurah juga sering diskusi dengan saya terkait sumber pembiayaan, kemarin saya juga sempat menyarankan pembangunan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran yang dimiliki desa. Saya juga dimintai tolong untuk mencari CSR hibah dll agar dapat membantu sumber pembiayaan pembangunan sarana kesehatan dan olahraga. Pembangunan kesehatan saya terlibat di Posyandu jiwa, lansia dan balita, namun tugas saya hanya mengkoordinasi melalui kader pemberdayaan yang sudah ditunjuk” (wawancara dengan Bapak Cholis Selaku PLD Karangpatihan pada 11 Januari).

Hasil wawancara dengan Bapak Cholis bahwa setiap tindakan pembangunan yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan sarana kesehatan dan olahraga selalu dikonsultasikan dengan PLD, sehingga PLD memiliki juga kewajiban untuk ikut memberikan informasi terkait dengan pembiayaan pembangunan sarana kesehatan. Posyandu jiwa, lansia dan balita yang diselenggarakan oleh pemerintah desa menjadi salah satu tugas dari peran perwakilan PLD untuk mendampingi pelaksanaannya. Pendampingan yang dilakukan PLD dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan melalui koordinasi dengan kader pemberdayaan yang sudah ada, sehingga PLD tidak harus selalu datang pada tiap pertemuannya. Koordinasi dengan kader pemberdayaan dirasa sangat memudahkan pelaksanaan pendampingan, sehingga PLD dapat mengerjakan pembangunan yang lainnya. Koordinasi dengan kader pemberdayaan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat setempat secara langsung sebagai agen perubahan dalam bidang kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber dan observasi yang dilakukan, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa peran perwakilan PLD dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan ialah pada pembangunan kesehatan yang bersumber pada dana desa. Saat ini pelaksanaan pembangunan kesehatan yang paling sering di koordinasikan antara pemerintah desa dan PLD terkait pembangunan sarana kesehatan dan olahraga. Banyak kendala yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam merealisasikan percepatan pembangunan sarana kesehatan dan olahraga tersebut, salah satunya ialah anggaran dana yang masih kurang. Pemerintah desa berupaya meminta agar PLD dapat memberikan informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan program dari mana saja yang dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan sarana kesehatan dan olahraga di Desa Karangpatihan. Pelaksanaan pendampingan pelayanan kesehatan melalui posyandu jiwa, lansia, dan balita dilakukan PLD dengan cara berkoordinasi dengan kader pemberdayaan yang sudah ada. Setiap pertemuan posyandu kader pemberdaya melaporkan hasil pelayanan kesehatan kepada PLD, sehingga ketika terdapat masalah mulai dini sudah dapat terdeteksi. Evaluasi selalu dilakukan oleh pemerintah desa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui saran dan masukan dari PLD dan kader pemberdayaan.

## **2. Faktor Penghambat Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam Pendampingan Pembangunan Desa Karangpatihan Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.**

Hambatan pendampingan dalam pembangunan Desa Karangpatihan mendorong para aparatur desa berusaha untuk menyiasati supaya pembangunan tetap terlaksana dengan baik. Berbagai hambatan tersebut salah satunya datang dari pendamping lokal desa, petikan hasil wawancara dengan Kepala Desa bahwa PLD kadang memiliki agenda lain sehingga tidak bisa hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Karangpatihan. Berikut selengkapnya hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Karangpatihan.

“.....hambatan yang paling terasa dalam pendampingan pembangunan itu ketika kita belum tau kegiatan ini bisa dimasukkan dana desa atau tidak, sedang Cholis masih ada pertemuan di desa lainnya. Kadang kita juga harus telpon-telponan agar segera selesai musyawarahnya. Menurut saya idealnya PDL itu satu PDL 2 desa lah maksimal. yang paling sering itu SPJnya mepet, kami bingung laporannya, minta tolong Mas Cholis buat bantu, ternyata dia sudah di mintai tolong sama desa lain” (wawancara dengan Bapak Eko Mulyadi selaku Kepala Desa Karangpatihan pada 11 Januari).

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Eko Mulyadi dapat disimpulkan bahwa hambatan pendampingan yang paling terasa karena waktu yang dimiliki PLD sangat sedikit karena dibagi dengan empat desa lainnya.

Kegiatan pembangunan di desa harus tetap berjalan, desa sebagai miniatur indonesia maka pembangunan tetap dilaksanakan meski terdapat kekurangan disana-sini. Sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pak Mujianto punya penilaian sendiri terkait dengan hambatan dari

peran pendamping lokal di desanya. Berikut wawancara peneliti bersama Bapak Mujiyanto.

“.....wilayah yang dimiliki Desa Karangpatihan sangatlah luas, saya melihat bahwa Mas Cholis kesulitan untuk menggali semua potensi yang ada di tiap RT/dusun. Karena potensi dan masalah yang harus diselesaikan sangat banyak. Mas Cholis juga kurang masalah komunikasi dengan kader pemberdayaa, itu terjadi karena saking banyaknya kader pemberdayaan yang kita miliki. (wawancara dengan Bapak Mujiyanto selaku Ketua BPD pada 11 Januari).

Hasil wawancara dengan Bapak Mujiyanto selaku Ketua BPD dapat diketahui bahwa hambatan pendampingan dikarenakan luas wilayah yang dimiliki oleh Desa Karangpatihan dan banyaknya kader pemberdayaan yang perlu dikoordinasikan sedang PLD harus menangani sendirian sebanyak lima desa terkait pendampingan pembangunan desa.

Hal senada juga benarkan oleh Pak W. Muh Lamin selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), berikut wawancaranya dengan peneliti.

“.....hambatan yang terasa dalam peran Mas Cholis selaku PDL disini, paling utama masalah waktu, karena pembangunan di desa kami pembangunannya lebih rajin di bandingkan desa lain. PLD ngantornya di kecamatan, kalau sewaktu-waktu kami membutuhkan harus telepon lebih dulu sedang kami inginnya cepat” (wawancara dengan Bapak Lamin selaku Ketua LPMD pada 11 Januari)

Hasil wawancara dengan Bapak Lamin selaku Ketua LPMD dapat diketahui bahwasanya PLD memang terkendala masalah waktu yang disebabkan oleh banyaknya desa yang menjadi tanggung jawab PLD. Kantor dari PLD ada di kantor Kecamatan Balong yang jarak tempuhnya ± 10Km dari Desa Karangpatihan sehingga hal ini menjadi hambatan dalam mengkoordinasikan pembangunan.



Hambatan selama menjalankan tugas sebagai PLD juga dirasakan oleh Pak Cholis, berikut wawancaranya bersama peneliti.

“hambatan yang terasa memang masalah waktu, ada lima desa yang harus saya dampingi dan itu tidak mudah untuk mengkoordinasikannya. Hambatan yang ke dua masalah koordinasi dengan pemerintah desa, karena Kades Karangpatihan aktifnya luar biasa, saya aja mau bertemu beliau sangat sulit, paling saya berkoordinasi dengan cariknya. Hambatan yang ketiga dalam menangani pembangunan di Karangpatihan itu masalah pendanaan mas, kemari saya sempat menghitung dengan Pak Kades kalau APBDes kita 4M mungkin 6-8 tahun seluruh pembangunan fisik disini baru bisa merata. Hambatan yang keempat perekonomian masyarakat desa yang berbeda dengan desa lainnya, sebagian masyarakat juga tuna grahita, sedang sebagian besar penduduknya berada di lereng bukit. Seharusnya kalau mau PLD kinerjanya bagus, 1 PLD maksimal 2 desa saja” (wawancara dengan Bapak Cholis selaku pendamping lokal desa pada 11 Januari).

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Cholis selaku pendamping lokal desa dapat diketahui apa saja hambatan yang dimiliki oleh PLD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berbagai hambatan yang ada dalam pendampingan desa merupakan hal biasa dan tidak menjadi penghalang bagi terlaksananya percepatan pembangunan di desa.

Hambatan peran pendamping lokal desa dalam pendampingan pembangunan Desa Karangpatihan karena masalah waktu. PLD memiliki waktu yang terbatas dalam pendampingan desa karena waktu pendampingan harus dibagi dengan 4 desa lainnya. Pendampingan yang dilakukan PLD bukan hanya peran pendampingan secara administratif. PLD memiliki peran dalam pendampingan desa meliputi peran perencanaan, peran pelaksanaan, peran pengawasan dll.

Hambatan berikutnya dalam pendampingan pembangunan di Desa Karangpatihan karena masyarakat desa yang beragam dan kondisi

geografisnya berada di lereng bukit sehingga akses menuju tempat pendampingan dirasa sulit. Kondisi masyarakat yang beragam dan kondisi geografis berupa perbukitan menyebabkan koordinasi dengan kader pemberdayaan dirasa tidak efektif. Ketidak efektifan tersebut terjadi karena kader pemberdayaan yang dimiliki tidak dapat melaporkan langsung hasil kegiatan atau kader pemberdayaan tidak dapat hadir dalam kegiatan karena akses menuju tempat kegiatan terjal dan membahayakan.

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam setiap kegiatan sudah barang tentu ada, tinggal bagaimana tekad untuk menyelesaikan tugas yang di embannya. Hambatan yang berdampak pada kegiatan lainnya ialah tiap 1 PLD mendampingi 5 desa dengan berbagai kompleksnya permasalahan yang ada di desa. Dirasa kurang efektif apabila setiap pendamping lokal desa harus membawahi 5 desa, sedang banyak desa yang memiliki segudang permasalahan yang perlu segera diselesaikan. Pembangunan yang di gagas oleh Presiden Joko Widodo yaitu pembangunan dari pinggir belum dapat terealisasi sepenuhnya. Terhambatnya gagasan pembangunan tersebut dikarenakan pendamping lokal desa tidak memiliki waktu yang cukup untuk mendampingi desa dalam pembangunan desa. Salah satu penyebab pembangunan yang lamban juga terjadi karena terbatasnya sumberdaya aparatur desa yang memiliki kompetensi dalam bidang pembangunan, sehingga pembangunan yang saat ini terjadi hanya bergantung pada pendamping desa.

### **C. Analisis Data dan Pembahasan**

#### **1. Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam pembangunan Desa Karangpatihan**

##### **a. Peran Fasilitasi dan Edukasi Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan**

Pentingnya peran fasilitasi dan edukasi dalam kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Perlu dipahami bahwa peran fasilitasi dan edukasi sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dan masyarakat Desa Karangpatihan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan. Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangpatihan melibatkan PLD, hal ini merupakan sebagai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang diperjelas melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa Pasal 12. Peran fasilitasi oleh PLD mendampingi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). PLD sebagai fasilitator mendampingi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di mulai dari tahap penggalian data pada tingkat dusun, musyawarah tingkat dusun dan kegiatan musyawarah tingkat desa. Upaya yang dilakukan oleh PLD ialah sebagai peran fasilitasi untuk mendampingi masyarakat desa dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan

pada tingkat desa. PLD sebagai fasilitator memberikan wadah agar aspirasi masyarakat desa dapat tersalurkan. Pendampingan yang dilakukan melibatkan seluruh komponen masyarakat desa, sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas. Peran fasilitasi pendampingan yang dilakukan oleh PLD dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ife (2008) bahwa peran agen perubahan dalam pemberdayaan masyarakat salah satunya ialah peran fasilitasi dimana peran fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat meliputi tujuh aspek, yaitu: (1) animasi sosial yang menunjukkan kemampuan untuk membangkitkan aspirasi, antusiasme, menstimulasi dan mengembangkan motivasi pada masyarakat untuk melakukan tindakan, (2) mediasi dan negosiasi yang menghubungkan berbagai kelompok kepentingan sehingga terciptanya sinergi dalam masyarakat desa, (3) memberi dukungan materil maupun non materil yang berkontribusi dalam pembangunan, (4) membentuk konsesus/kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama dengan menghargai keragaman di dalam masyarakat, (5) fasilitasi kelompok secara menyeluruh dalam pembangunan, (6) pemanfaatan sumber daya dan ketrampilan dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat desa, (7) mengorganisasi untuk berfikir strategis agar tujuan pembangunan dapat terwujud. Jika dilihat peran yang dilakukan oleh PLD dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Ife (2008) tentang agen perubahan dalam

pemberdayaan masyarakat melalui peran fasilitasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran fasilitasi dalam pendampingan yang dilakukan oleh PLD memiliki peran penting untuk membantu Pemerintah Desa Karangpatihan dalam pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh masyarakat desa hingga menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Peran yang dilakukan PLD sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa Pasal 12 diharapkan agar pembangunan di desa sejalan dengan prioritas pembangunan yang digagas oleh pemerintah pusat karena pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Peran edukasi dalam mendampingi pembangunan di Desa Karangpatihan dapat dilihat melalui kegiatan yang dilakukan oleh PLD. Kegiatan yang dilakukan oleh PLD dalam penyusunan dokumen perencanaan meliputi penggalan data bersama BPD dari tingkat RT/Dusun, penggalan data melalui kader pemberdayaan, musyawarah tingkat RT/Dusun, dan musyawarah pada tingkat desa. Dalam tahapan penggalan data bersama BPD, pertemuan dilaksanakan melalui pertemuan arisan/yasinan yang ada di RT/Dusun. Pertemuan tersebut diatur oleh BPD selaku penyelenggara dan PLD hanya mendampingi pelaksanaan penggalan data pada tingkatan tersebut. Penggalan data yang dilaksanakan akan menghasilkan masalah-masalah yang dianggap mendesak oleh masyarakat untuk segera diselesaikan. Dalam tahapan ini PLD memberikan



pengetahuan sebagai salah satu peran edukasi kepada masyarakat agar usulan pembangunan yang diberikan dapat diukur melalui skala kebutuhan (bukan skala keinginan). PLD sebagai edukator diharapkan agar masyarakat mampu memahami skala prioritas yang ingin dicapai dalam pembangunan, sehingga dapat berdampak pada kualitas usulan kegiatan yang diajukan. Sumber daya dan potensi yang ada di Desa Karangpatihan dapat digunakan sebagai modal pembangunan. PLD memberikan edukasi kepada masyarakat agar memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, untuk digunakan secara optimal dalam pembangunan desa. Edukasi tersebut dilakukan agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan karakteristik yang dimiliki Desa Karangpatihan. Ketika masyarakat sadar pada masalah dan potensi yang mereka miliki, maka usulan kegiatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lebih beragam sesuai dengan karakteristik Desa Karangpatihan. Edukasi yang dilakukan oleh PLD bukan dalam takaran intervensi pembangunan, melainkan skala prioritas yang dapat memberikan keadilan bagi masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan. Sesuai dengan teori yang dikemukakan Iff (2008) bahwa agen perubahan dalam pemberdayaan masyarakat salah satunya melalui peran edukasi yang meliputi (1)membangkitkan kesadaran masyarakat dengan memotivasi agar berusaha menyelesaikan masalah, (2)menyampaikan informasi terkait isu dan masalah yang dihadapi masyarakat, (3)mengkonfrontasi masyarakat agar bertindak cepat dalam keadaan mendesak, (4)memberikan ketrampilan bagi masyarakat. Jika

dilihat berdasarkan peran edukasi, maka peran edukasi yang dilakukan oleh PLD Karangpatihan sama seperti halnya empat point tentang peran agen perubahan dalam pemberdayaan masyarakat melalui peran edukasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas salah satunya ditunjang tenaga PLD yang memiliki kemampuan edukasi kepada masyarakat. Peran edukasi yang dilakukan akan berdampak pada hasil dokumen perencanaan, sehingga dapat menjadi acuan/pedoman pemerintah desa dalam pembangunan desa. Sedang menurut hasil penelitian dalam Jurnal Administrasi Publik oleh Hasyemi Rafsanjani, Bambang Supriyono dan Suwondo bahwa (1)Proses perencanaan pembangunan di Desa Sumber Ngepoh, LPMD dan Kepala Desa bersama-sama dan bekerja sama untuk menyusun perencanaan, (2)Pelaksanaan Musrenbang menggunakan sistem *Top Down – Bottom Up* dimulai dari pendataan aspirasi masyarakat dan ditindak lanjuti dengan bermusyawarah sehingga menghasilkan usulan prioritas pembangunan yang memiliki tingkat urgensi yang baik, (3)Musrenbang menghasilkan daftar usulan prioritas pembangunan yaitu: prioritas bidang infrastruktur, bidang sosial budaya dan bidang perekonomian. Dilihat dari hasil peran PLD dalam pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Desa Karangpatihan, sama seperti halnya hasil penelitian dalam jurnal administrasi publik tersebut. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pendamping lokal desa menggunakan sistem *Bottom-Up* dimana PLD menggali potensi dan melakukan edukasi agar masyarakat desa

memberikan usulan kegiatan kepada pemerintah desa melalui musrenbang desa. Pelaksanaan musrenbang desa akan menghasilkan daftar usulan prioritas desa yang digunakan pemerintah desa sebagai acuan pembangunan desa. Namun tidak semua usulan prioritas tersebut dapat dibiayai menggunakan dana desa, maka pendamping desa memiliki peran untuk menyelaraskan usulan prioritas dengan sumber pendanaan yang dimiliki oleh Desa Karangpatihan. Peran yang dilakukan PLD dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa selama ini telah berhasil hingga menghasilkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Hasil ini sesuai dengan yang dikemukakan Iff (2008:558) bahwa PLD memiliki peran untuk mendampingi Desa Karangpatihan dalam pembangunan sebagai seorang fasilitator dan edukator. Dalam pendampingan penyusunan dokumen perencanaan, PLD sebagai fasilitator diperlukan agar seluruh aspirasi masyarakat dapat tersalurkan sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas. PLD sebagai edukator diperlukan agar usulan-usulan kegiatan yang diajukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

#### **b. Peran Teknis Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur**

Peran teknis PLD memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan infrastruktur, dimana infrastruktur menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan infrastruktur sebagai proses pemberdayaan karena dalam

pelaksanaan pembangunan melibatkan masyarakat desa. Peran teknis PLD dalam pendampingan pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa memiliki posisi yang strategis sehingga memberikan pengaruh yang besar terhadap keberhasilan pembangunan di desa. Peran teknis PLD dilakukan dalam pembangunan infrastruktur desa mulai dari tahap penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar bangunan, pencairan anggaran, monitoring pekerja yang melaksanakan pembangunan, monitoring pelaksanaan pembangunan dan tahap penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Peran teknis yang dimiliki oleh PLD sangatlah strategis dimana berkaitan mengenai dapat dijalankan atau tidak pembangunan infrastruktur di Desa Karangpatihan. Terlaksana atau tidak terlaksananya pembangunan infrastruktur desa di pengaruhi oleh sumber anggar melalui dana desa yang perlu dicairkan oleh PLD. Selain itu peran teknis yang dilakukan PLD sebagai teknisi untuk menggambar bangunan yang akan dilaksanakan. Peran teknis tersebut dilakukan bersama-sama pendamping teknis yang berkedudukan di kecamatan. Peran teknis PLD berikutnya ialah mengkontrol pembelanjaan bahan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Harapan dengan adanya kontrol tersebut tidak terjadi diskresi dalam pelaksanaan pembangunan. Sesuai yang dikemukakan oleh Iff (2008) bahwa peran agen pemberdayaan salah satunya adalah peran teknis yang meliputi (1)menganalisis melalui metode tertentu dalam keberlanjutan pembangunan, (2)penguasaan komputer sebagai penunjang pembangunan, (3)melakukan presentasi baik secara tulis maupun lisan,

(4) pengelolaan program berkaitan dalam membangun struktur, nilai, prosedur, dan mekanisme, (5) pengelolaan keuangan dan manajemen keuangan. Jika dilihat berdasarkan lima point diatas, PLD Karangpatihan telah berperan aktif melalui kemampuan teknisnya sehingga pembangunan infrastruktur dapat terealisasi. Hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwasannya PLD Karangpatihan dalam pembangunan infrastruktur memiliki peran secara teknis sesuai yang di kemukakan oleh Ife (2008), sehingga pembangunan infrastruktur dapat di laksanakan.

Menurut Adisasmita (2006:3) Pelaksanaan pembangunan desa mengacu tercapainya tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Hal tersebut sesuai dengan pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Karangpatihan, dimana pendamping desa mendampingi pembangunan infrastruktur sebagai salah satu *multiplier effect* bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan akan memberikan dampak positif dalam pembangunan ekonomi desa. Pembangunan jalan menuju tempat-tempat wisata diharapkan berdampak pada peningkatan kunjungan wisata di Desa Karangpatihan. Peningkatan tersebut secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk membuka usaha terkait pemenuhan kebutuhan wisatawan. Pembangunan infrastruktur juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menjual hasil panennya ke pasar. Pembangunan infrastruktur sebagai upaya pemerintah desa jangka



panjang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kemudahan perekonomian melalui aksesibilitas yang mudah dan aman. Hal ini sesuai juga dengan pendapat Adisamita (2013;57) bahwa pembangunan jangka panjang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha, bina manusia, dan secara langsung meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Menurut hasil penelitian dalam Jurnal Administrasi Publik oleh Amelyana Agustin, Sjamsiar Sjamsuddin dan Ratih Nur Pratiwi bahwa pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagian dibantu oleh swadaya masyarakat sehingga pembangunan yang dilaksanakan berjalan cepat dan hasil pembangunan yang dilaksanakan berjalan cepat dan hasil pembangunan dapat segera digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Sejalan dengan hasil penelitian dalam Jurnal Administrasi Publik, bahwa PLD dalam pendampingan pembangunan infrastruktur desa salah satunya berperan teknis untuk melaksanakan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pembangunan desa dicapai melalui pemberdayaan masyarakat. Upaya percepatan pembangunan infrastruktur Desa Karangpatihan salah satunya diwujudkan melalui swadaya masyarakat. Setiap kegiatan pembangunan infrastruktur

melibatkan masyarakat desa sebagai proses pemberdayaan masyarakat desa. Banyaknya masyarakat desa yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pembangunan. Disinilah peran teknis PLD untuk mengkoordinasi pemberdayaan masyarakat. Koordinasi dilakukan bersama bersama LPMD agar pembangunan desa segera terwujud dan hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.

**c. Peran Perwakilan Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan**

Pembangunan kesehatan menjadi salah satu point strategis pembangunan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kesehatan akan mempengaruhi sejauh mana kemampuan masyarakat dalam memperkuat perekonomian desa. Hasil observasi peneliti, menemukan berbagai permasalahan kesehatan yang ada di Desa Karangpatihan. Permasalahan kesehatan tersebut diantaranya muncul pada kalangan masyarakat yang mengalami keterbelakangan mental (tuna grahita), melemahnya kesehatan lansia sehingga rentan sakit dan balita. Pemerintah Desa Karangpatihan memiliki program pembangunan kesehatan melalui Posyandu jiwa, Posyandu lansia dan Posyandu balita. Sesuai dengan hasil wawancara bahwa PLD melalui peran perwakilan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Desa Karangpatihan hanya melakukan koordinasi pelaksanaan Posyandu melalui kader pemberdayaan. Setiap pelaksanaan Posyandu kader pemberdayaan wajib hadir untuk memberikan

informasi kepada PLD terkait jalannya kegiatan. Informasi tersebut disampaikan sebagai bahan pengawasan agar pelayanan Posyandu yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Peran yang dilakukan PLD tersebut adalah salah satu peran perwakilan dalam pembangunan kesehatan di Desa Karangpatihan. Upaya memperoleh informasi pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, PLD tidak diwajibkan untuk hadir langsung dalam kegiatan tersebut, karena sudah ada kader pemberdayaan yang mengkoordinasikan hasil-hasil kegiatannya. Terkait permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Posyandu, PLD hanya melakukan koordinasi melalui Kader Pemberdayaan. Peran koordinasi melalui kader pemberdayaan merupakan salah satu wewenang PLD untuk mengorganisir sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa. Peran koordinasi yang dilakukan PLD Karangpatihan telah menjalankan salah satu amanat peraturan terkait dengan pendampingan desa.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan di Desa Karangpatihan juga menyentuh pada aspek sarana dan prasarana olahraga. Pembangunan yang dilaksanakan meliputi pembangunan lapangan sepak bola dan gedung bulutangkis yang dapat digunakan oleh masyarakat. Pembangunan yang dilakukan sampai saat ini masih mengalami kendala terkait dengan pendanaan. Hasil wawancara peneliti bahwa PLD dimintai untuk mencari pendanaan lain di luar anggaran yang ada di desa. PLD perlu memperkenalkan dan mempromosikan pembangunan sarana olah raga

keluar agar diketahui banyak pihak sehingga dalam pembangunannya dapat di bantu dengan pihak lain. Pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa mendorong PLD untuk berupaya bagaimana memperoleh sumber dana yang dapat digunakan dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga. Menurut Ife (2008) bahwa peran perwakilan dalam pemberdayaan masyarakat meliputi (1)mencari sumberdaya fasilitas, informasi pelayanan, (2)advokasi pada masyarakat, (3)memanfaat media sebagai sarana memperkenalkan program yang dijalankan melalui dialog dan wawancara, (4)hubungan masyarakat dengan mempublis kegiatan yang dijalankan agar masyarakat mengetahui sehingga berdampak pada dukungan masyarakat terhadap program yang dijalankan, (5)mengembangkan jaringan dengan menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak dan mengajak berpartisipasi, (6)membagi pengetahuan dan pengalaman dengan momposisikan diri sebagai pihak yang selalu belajar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PLD berupaya mewujudkan percepatan pembangunan yang diminta oleh pemerintah desa dengan menggali informasi sumber dana yang dapat digunakan dalam pembangunan sarana olahraga. Pencarian sumber dana lain di luar Desa Karangpatihan merupakan salah satu tugas yang tidak diatur dalam peraturan terkait dengan pendampingan desa. Upaya ini ditempuh dalam mewujudkan tercapainya pelayanan kesehatan melalui sarana dan prasarana olahraga, sehingga PLD merasa perlu membantu meski tidak diatur di dalam peraturan pemerintah. Menurut Soekanto (1990:39), peranan ialah aspek

dinamis dari kedudukan dan karena kedudukan itulah seseorang melakukan tindakan atau gerak perubahan dinamis dimana usaha itu diharapkan tercipta keadaan/hasil yang diinginkan. Sejalan dengan pendapat tersebut, bahwa PLD Karangpatihan menjalankan perannya sesuai dengan tugas pokok fungsi yang dimilikinya, namun ketika ada hasil yang diinginkan terhalang oleh sumber pendanaan maka PLD melakukan gerak perubahan secara dinamis agar hasil yang diinginkan dapat tercapai.

## **2. Faktor Penghambat Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) Dalam Pendampingan Pembangunan Desa Karangpatihan Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.**

Pembangunan Desa Karangpatihan menjadi tantang bagi pemerintah desa demi terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat desa. Dalam pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat desa, pemerintah desa yang di dampingi oleh PLD. Peran sentral PLD ialah untuk mendampingi pembangunan di desa yang berakar pada pelaksanaan pembangunan desa menggunakan dana desa dari pemerintah pusat (APBN). Peran PLD dalam pendampingan pembangunan desa dipengaruhi oleh beberapa penyebab sehingga pembangunan desa menjadi terhambat. Adapun yang menjadi penghambat peran PLD dalam pendampingan pembangunan Desa Karangpatihan yaitu:

1. Permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat desa sangat beragam dan setiap desa memiliki ke khasan dalam potensi masalah yang muncul maupun cara mengatasi permasalahan yang ada. Maka PLD



dalam melaksanakan pendampingan perlu memiliki keterampilan lebih agar dapat membaca keinginan masyarakat dan menyelesaikan masalah yang ada. Sering kali masalah akan timbul di dalam masyarakat desa mana kala konflik kepentingan masuk pada pembangunan desa. Dalam menyusun dokumen perencanaan seringkali kelompok masyarakat tertentu ingin di dahulukan kepentingannya. Hal tersebut menjadi hambatan bagi peran PLD dalam mendampingi pembangunan desa, mana kala keinginannya tersebut bertentangan dengan peraturan terkait dengan penggunaan dana desa.

2. Pembangunan di Desa Karangpatihan sudah dapat terlaksana, walaupun begitu selalu muncul permasalahan ketika PLD tidak dapat mendampingi kegiatan secara langsung. Waktu pendampingan yang dilakukan oleh PLD dalam pembangunan Desa Karangpatihan dirasa masih kurang. Masih kurangnya waktu pendampingan disebabkan karena PLD memiliki tugas untuk mendampingi 4 desa lainnya.
3. Luasnya wilayah yang dimiliki Desa Karangpatihan dan akses jalan yang sulit, menjadi hambatan bagi peran PLD dalam mendampingi pembangunan Desa. Hal tersebut membuat PLD tidak mudah untuk mencapai tempat pendampingan guna mendampingi desa dalam pembangunan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

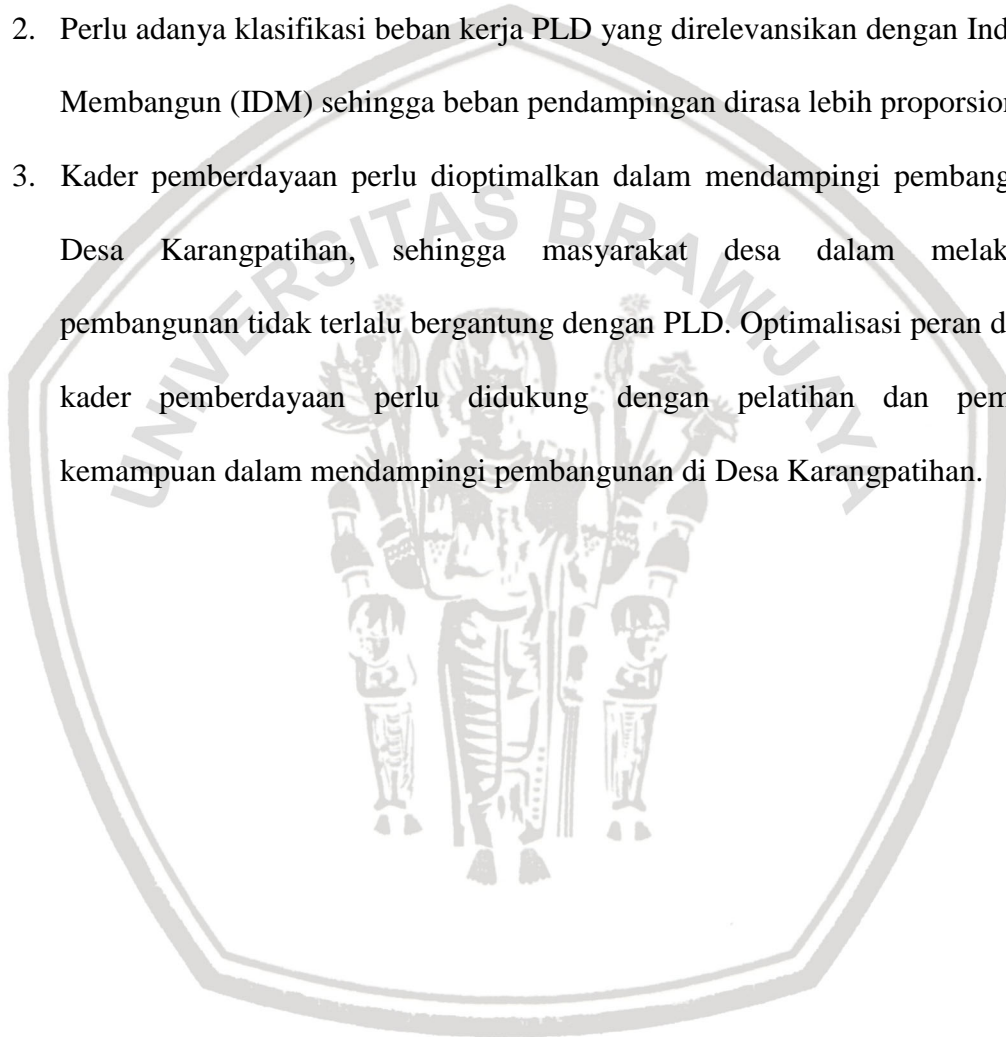
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. PLD melaksanakan peran fasilitasi dan edukasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Peran fasilitasi yang dilakukan PLD yaitu memberikan wadah kepada masyarakat dalam menyalurkan aspirasi melalui musrenbang. Peran edukasi yang dilakukan PLD ialah memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar usulan musrenbang dapat diukur melalui skala prioritas, kebutuhan dan mendesak/tidaknya.
2. PLD melaksanakan peran teknis dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Karangpatihan. Peran teknis PLD dimulai pada tahap penyusunan rencana anggaran biaya, gambar bangunan, pencairan anggaran, monitoring pembangunan, dan tahap Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
3. PLD melaksanakan peran perwakilan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dan sarana olahraga Desa Karangpatihan. Peran perwakilan dilakukan oleh PLD dalam pembangunan kesehatan melalui Posyandu Jiwa, Posyandu Lansia, dan Posyandu Balita dengan melakukan koordinasi bersama kader pemberdayaan.
4. Hambatan yang dihadapi PLD dalam mendampingi pembangunan Desa Karangpatihan yaitu terbatasnya waktu pendampingan yang dimiliki PLD, karena 1 PLD memberikan pendampingan sebanyak 5 desa. Minimnya kontribusi dan lemahnya pengetahuan kader pemberdayaan dalam mendampingi pembangunan di Desa Karangpatihan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka disarankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya rekan kerja yang dimiliki PLD dalam membantu pendampingan di Desa Karangpatihan. Pendamping yang berkedudukan dikecamatan juga dapat terlibat langsung dalam melaksanakan pendampingan.
2. Perlu adanya klasifikasi beban kerja PLD yang direlevansikan dengan Indeks Desa Membangun (IDM) sehingga beban pendampingan dirasa lebih proporsional.
3. Kader pemberdayaan perlu dioptimalkan dalam mendampingi pembangunan di Desa Karangpatihan, sehingga masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan tidak terlalu bergantung dengan PLD. Optimalisasi peran dan tugas kader pemberdayaan perlu didukung dengan pelatihan dan pembekalan kemampuan dalam mendampingi pembangunan di Desa Karangpatihan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006a. *Membangun Desa Partisipatif*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2006b. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Pembangunan Perdesaan; Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Arikunto, S. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineke Cipta
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kaho, Josef Riwu, 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Fak. Sospol - UGM, Yogyakarta
- Miles, M.B, Heberman, A.M, dan Saldana, J. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edition 3*. USA : Sage Publication.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rita Pranawati dan Irfan Abubakar. 2009. *Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Perdamaian*. Jakarta Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2016 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 133 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa



Peraturan Menteri DesaPembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa

\_\_\_\_\_. 2017. *Luas Daerah dan jumlah pulau menurut provinsi*. (Online).  
<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1366> diakses pada 20 Oktober 2017 Pukul 20.00 WIB

<http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/SubMenu/totalDOB.pdf> diakses pada 20 Oktober 2017 Pukul 20.00 WIB

Jurnal Administrasi Publik(JAP), Vol. 2, No,4, Hal, 735-739 oleh Amelyana Agustin, Sjamsiar Sjamsudana desain dan Ratih Nur Pratiwi judul *Efektivitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang*

Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 4, Hal. 67-72 oleh Hasyemi Rafsanzani, Bambang Supriyono, Suwondo dalam Jurnal Administrasi Publik dengan Judul *Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang*

